

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI MI NEGERI 1 PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
(S.Pd)**

Oleh :

ALDI PRASTIYA

NIM. 1817401006

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFFUDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Aldi Prastiya

Nim : 1817401006

Jenjang : S1

Jurusan : Pendidikan Islam

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto 20 September 2022



Aldi Prastiya

NIM.1817401006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MI NEGERI 1 PURBALINGGA

Yang disusun oleh: Aldi Prastiya (NIM 1817401006), Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam, Jurusan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari: Kamis, tanggal 29 bulan September tahun 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan (S.Pd.)** pada sidang Dewan Penguji skripsi.

Penguji I/Ketua sidang/Pembimbing,

Penguji II/Sekretaris Sidang,

Dr. Kholid Mawardi, S.Ag.,M.Hum
NIP. 197402281999031005

Sutrimo Purnomo, M.Pd.
NIP. 199201082019031015

Penguji Utama,

M.A. Hermawan, M.S.I.
NIP. 197712142011011003

Mengetahui :

Ketua Jurusan Pendidikan Islam

Dr. H.M. Slamet Yahya, M.Ag.
NIP. 197211042003121003



NOTA DINAS PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi sdr. Aldi Prastiya
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Pendidikan Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Aldi Prastiya
NIM : 1817401006
Jurusan : Pendidikan Islam
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga

Sudah dapat diajukan kepada Ketua Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 September 2022

Pembimbing,

Dr. Khalid Mawardi, S.Ag., M.Hum

NIP. 197402281999031005

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MI NEGERI 1 PURBALINGGA

Aldi Prastiya

NIM. 1817401006

ABSTRAK

Komite sekolah memiliki peran sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai mediator. Dari keempat peran tersebut, diharapkan komite sekolah mampu membantu satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mampu melaksanakan pengelolaan pendidikan secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, ketua komite sekolah, guru dan wali murid. Analisis data yang digunakan melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga dalam meningkatkan mutu pendidikan sudah menjalankan perannya dengan cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang belum dijalankan. Walau begitu, sudah cukup banyak kontribusi yang diberikan oleh komite sekolah dalam menjalankan perannya. Peran yang sudah dijalankan oleh komite sekolah diantaranya ialah, komite sekolah mendukung program-program yang ada di sekolah, dukungan berupa ide-ide maupun dalam segi pendanaan. Selain itu, komite sekolah sudah menjadi penghubung yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Kedepannya diharapkan komite sekolah dapat bekerjasama serta bersinergi lebih baik lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Komite Sekolah, Mutu Pendidikan

THE ROLE OF SCHOOL COMMITTEES IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN MI NEGERI 1 PURBALINGGA

Aldi Prastiya

NIM. 1817401006

ABSTRACT

The school committees have roles as consideration, supporters, controllers, and as mediators. Oh the four roles, the school committees is expected to assist the education unit in improving the quality of education and able to implement efficient education management. This study aims to describe the role of school committees in improving the quality of education in MI Negeri 1 Purbalingga. The method used in this study is a qualitative method, with a descriptive approach. Data collection techniques in this study through interviews, observation and document study. Interviews are conducted with principals, school committees, teachers and guardians. Data Collection techniques in this study were through interviews, observations, and document studies. Data analysis used through the three steps of data reduction, data presentation and Conclusion Drawing. The results showed that the role of the school committee in MI Negeri 1 Purbalingga in improving the quality of education had carried out its role quite well, because there are still some things that have not been executed. However, there are quite a few contributions given by the school committee in carrying ou is role. The role that has been run by the school committee is, the school committee supports the programs in the school, support the from of ideas and in terms of funding. In addition, the school committee has become a good liaison between the school and parents. In the future, it is hoped that the school committee can work together and work together better to improve the quality of education.

Keywords: School Committee, Quality of Education

MOTTO

“Hidup bukan hanya sekedar bernafas, langkah hidup haruslah jelas”



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih atas segala do'a, petunjuk, binaan serta kerjasama segala pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tanpa hambatan yang berarti. Maka dari itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Suwito, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Suparjo, M.A., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Subur, M. Ag., selaku Wakil dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Sumiarti, M. Ag., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Novan Ardi Wiyani, M. Pd.I., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Khalid Mawardi, M,Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran tenaga dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap dosen, staf dan karyawan UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah memberikan berbagai pengetahuan dan juga bimbingan dala perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Siti Honi'ah ,S.Ag, M.Pd. selaku kepala sekolah MI Negeri 1 Purbalingga yang telah memberikan kesempatan, motivasi dan juga bimbingannya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Rois Mahfud S.E. selaku ketua Komite MI Negeri 1 Purbalingga yang telah meluangkan waktunya guna memberi informasi tentang komite sekolah.
10. Bapak Arif Mutaqin S.Pd. selaku Guru yang senantiasa memberi waktunya untuk wawancara skripsi ini.
11. Kepada Orangtua, Keluarga, Orang terdekat, sahabat dan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.
12. Abah Kyai Ahmad Nailul Basith, Bu nyai Samrotus Zahro, Umi siti Nur Janah dan segenap keluarga besar pondok pesantren Roudhlotul Uluum Balong.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pada skripsi ini, dan penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Aamiin.*

Purwokerto 20 September 2022



Aldi Prastiya

NIM.1817401006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Konseptual.....	3
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Komite Sekolah	10
1. Pengertian Komite Sekolah	10
2. Tujuan Komite Sekolah	11
3. Fungsi Komite Sekolah	12
4. Peran Komite Sekolah.....	14
5. Keanggotaan dan Kepengurusan Komite Sekolah.....	15
6. Hubungan Sekolah dengan Komite (Masyarakat).....	16
B. Mutu Pendidikan.....	17
1. Pengertian Mutu Pendidikan	18
2. Karakteristik Mutu Pendidikan.....	20
3. Standar Mutu Pendidikan	22
4. Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan.....	24
BAB III.....	30

METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Subyek dan Obyek Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Uji Keabsahan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	36
A. Gambaran Umum MI Negeri 1 Purbalingga	36
1. Identitas Sekolah	36
2. Sejarah singkat MI Negeri 1 Purbalingga	36
3. Visi dan Misi MI Negeri 1 Purbalingga.....	38
4. Tujuan MI Negeri 1 Purbalingga.....	38
5. Keadaan peserta didik di MI Negeri 1 Purbalingga	39
6. Tenaga Pendidik di MI Negeri 1 Purbalingga	40
7. Sarana dan Prasarana MI Negeri 1 Purbalingga.....	40
B. Penyajian Data Terkait Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga.....	44
1. Profil Komite Sekolah	44
2. Tujuan pembentukan komite	44
3. Keanggotaan komite sekolah.....	45
4. Peran Komite Sekolah.....	47
5. Strategi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu	54
6. Kendala yang dihadapi komite sekolah dan solusinya	57
C. Analisis Data	58
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Keterbatasan Penelitian	66
C. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dan Observasi di MI Negeri 1 Purbalingga
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 SK Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi Pendahuluan
- Lampiran 5 Blangko Bimbingan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Surat Ijin Riset Individual
- Lampiran 9 Kartu Tanda Mahasiswa
- Lampiran 10 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat KKN
- Lampiran 14 Sertifikat PKL
- Lampiran 15 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 16 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
- Lampiran 17 Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 18 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penuntun umat manusia dalam menjalani kehidupannya dan sekaligus untuk memperbaiki nasib serta peradaban umat manusia.¹ Keberadaan peran masyarakat kepada lembaga dalam memajukan lembaga menjadi point utama dalam memperbaiki kualitas lembaga. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan, maka dibutuhkan suatu wadah atau organisasi untuk menggali potensi masyarakat untuk sama-sama memajukan dunia pendidikan bersama pihak sekolah. Karena sejatinya, pendidikan bukan hanya milik pihak sekolah dan siswa saja. Namun, masyarakat juga memiliki dunia pendidikan khususnya orang tua siswa. Keberhasilan suatu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak sekolah saja. Orang tua dan masyarakat juga harus berpartisipasi di dalamnya untuk sama-sama memajukan pendidikan. Untuk itu, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas sebagai pen jembatan antara pihak sekolah dengan masyarakat, dan sebagai badan yang bertugas membantu pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang disebut sebagai komite sekolah.

Meningkatnya mutu pendidikan bukan hanya ditentukan dan dipengaruhi oleh tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, metode penelitian, alat pendidikan, tetapi juga ditentukan dan dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan itu sendiri dalam hal ini masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang partisipasinya bagi pendidikan sungguh sangat diharapkan karena tanpa adanya kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat, maka mustahil tujuan yang diinginkan

¹ Hajair Sanaly, *Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 211.

bersama dapat berjalan dengan baik dan lancar.² Kegiatan proses belajar mengajar merupakan aspek penting dalam menentukan peningkatan mutu pendidikan. Sementara faktor lain yang diperlukan untuk mendukung dan mempengaruhi seperti kelengkapan sarana prasarana, keterlibatan peran orang tua dan masyarakat.³

Orang tua pada umumnya tidak mempunyai alasan untuk terlibat aktif di sekolah, khususnya sebagai anggota komite sekolah. Kepedulian akan berhasil jika ada keinginan yang kuat dari dalam diri untuk benar-benar terlibat dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Persoalan yang terjadi adalah masih banyaknya orang tua yang belum melibatkan diri dalam peningkatan mutu pendidikan.⁴ Keberadaan komite sekolah memberikan peran strategis terutama dalam mengaktualisasikan kepentingan masyarakat kepada sekolah atau pemerintah. Keberadaan komite sekolah juga menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan mengakomodasikan serta memformulasikan ke dalam program-program sekolah dan kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat.

Salah satu lembaga pendidikan yang dapat dikatakan mutu pendidikannya bagus di Purbalingga adalah MI Negeri 1 Purbalingga. Karena didukung dengan tenaga pendidik yang berpengalaman dengan kualifikasi sarjana Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Dari fasilitas yang dimiliki dan layanan yang diberikan oleh MI Negeri 1 Purbalingga, maka tidak dipungkiri jika setiap orangtua siswa menginginkan anaknya untuk bersekolah di MI Negeri 1 Purbalingga. Hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya, karena masyarakat meyakini bahwa sekolah tersebut dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang religius, berakhlakul karimah, berkualitas dan unggul.

Saat ini MI Negeri 1 Purbalingga merupakan salah satu Madrasah Ibtidaiyah unggulan di Purbalingga yang dianggap menjadi rujukan dan

² Edwar Sallis, *Total Quality Managemen In Education* (Yogyakarta: IRCisode, 2008), hlm. 38.

³ Suparlan, *Membangun Sekolah Efektif* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), hlm. 107.

⁴ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Aspirasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 242.

pilihan masyarakat karena kualitas pendidikannya yang tidak diragukan lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari status sekolah yang memiliki Akreditasi A serta prestasi akademik dan non akademik yang diraih oleh siswa dan sekolah sehingga membuat sekolah tersebut baik dan menjadi sorotan masyarakat. Namun dilain hal, komite sekolah masih belum maksimal dalam menjalankan perannya sesuai dengan seharusnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan tidak ikut serta dalam memberikan masukan pada kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidik. Sebagai pendukung, komite sekolah sudah menjalankan perannya dengan baik. Sebagai pengontrol, komite sekolah hanya mengawasi program sekolah serta pendanaan yang tidak di danai oleh pemerintah. Serta sebagai mediator, komite sekolah hanya sebagai penyalur informasi ke orang tua siswa terkait program dan kegiatan di sekolah.

Melihat realitas tersebut penulis merasa perlu mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi dengan judul “PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MI NEGERI 1 PURBALINGGA”.

B. Definisi Konseptual

Peneliti memandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dan bersifat khas yang melekat pada tulisan ini, istilah tersebut antara lain adalah peran, tokoh masyarakat, peningkatan mutu pendidikan.

1. Peran

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam

situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁵

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role).⁶

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. Komite sekolah

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara umum kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan, yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Menurut Syaiful Sagala, komite sekolah merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas di

⁵ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; PT Raja Grafindo persada, 2012), hlm.213

⁶ Syamir, Torang, *Organisasi & Manajemen (perilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86

daerahnya.⁷Nanang Fatah memberikan pengertian tentang komite sekolah dalam bukunya, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, “Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokrasi oleh para stake holders pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan”⁸. Lebih lanjut oleh Djam’an Satori dalam bukunya Mulyono, mengatakan bahwa “komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah.”⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite sekolah menjadi wadah/forum untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyadarkan masyarakat atas peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Adapun peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup peran komite dalam badan pemberi pertimbangan, badan pendukung, badang pengontrol dan sebagai mediator.

3. Peningkatan mutu pendidikan

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bermanfaat terhadap seluruh masyarakat dilihat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seperti kebutuhan masyarakat akan hubungannya di dalam kelompok (misalnya berinteraksi sesama anggota masyarakat). Sementara pendidikan menurut prespektif pendidikan itu sendiri dapat dilihat dari sisi prestasi siswa, mulai dari proses pembelajaran, kemampuan lulusan dalam mengembangkan potensinya di masyarakat serta dalam hal

⁷ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm, 251.

⁸ Nanang Fatah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), hlm, 149.

⁹ Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm, 258.

memecahkan masalah dalam berpikir kritis. Kualitas pendidikan dapat di tingkatkan melalui beberapa cara yaitu seperti yang di ungkapkan oleh John Bishop. Meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan memperbaiki tes bakat sertifikasi kompetensi dan portofolio, membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif, menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi jam belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada hari-hari libur, meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik, membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan ketrampilan memperoleh pekerjaan, bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, membimbing siswa menilai pekerjaan-pekerjaan, membimbing siswa membuat daftar riwayat hidupnya dan mengembangkan portofolio pencarian pekerjaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi oleh penelitian selanjutnya dan sebagai bahan kajian untuk pengembangan Ilmu Keguruan.

Manfaat Praktis

- 1) Peneliti mampu memahami konsep serta prosedur yang benar dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.
- 2) Peneliti mampu menggunakan teori dan teknik yang telah didapat selama masa perkuliahan, khususnya teori tentang Ilmu Keguruan.
- 3) Hasil penelitian dapat dijadikan kajian bagi peneliti lain dalam pengembangan riset yang melakukan penelitian sejenis dimasa mendatang, terkait dengan penggunaan media pembelajaran.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu uraian sistematis tentang keterangan yang telah dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian dan mendukung betapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Untuk itu, dikemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah peneliti sebagai berikut:

Penelitian atas nama Windi Retno Bintari dengan judul Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di SD Negeri Megulung Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.¹⁰ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Windi Retno Bintari membahas terkait bagaimana peran komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Megulung Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.

Penelitian atas nama Bustanul Arifin dengan judul penelitian Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Sarana Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo Ngawi.¹¹ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bustanul Arifin membahas terkait bagaimana peran masyarakat dalam wadah komite sekolah untuk meningkatkan mutu

¹⁰ Windi Retno Bintari, Skripsi: "*Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di SD Negeri Megulung Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo*" (Yogyakarta: UNY, 2018).

¹¹ Bustanul Arifin, Skripsi: "*Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Sarana Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo Ngawi*" (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

pendidikan di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi dan bagaimana peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Selanjutnya penelitian atas nama Rahmadi Tanjung dengan judul *Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah*.¹² Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi Tanjung adalah bagaimana peran komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan, apa peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan dan apa faktor pendukung dan penghambat peranan komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian terdahulu perbedaannya dengan penelitian yang peneliti teliti adalah ketiga kajian terdahulu itu membahas peran komite sekolah, peran masyarakat yang diwadahi komite sekolah dan peran komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang sistematis, urut, dan logis maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari tiga bagian yang meliputi bagian awal, utama dan akhir, yaitu sebagai berikut:

Bagian awal meliputi sampul depan, halaman judul skripsi, halaman keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak dan kata kunci, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

Bagian utama skripsi ini memuat pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam bab I sampai bab V yakni sebagai berikut:

¹² Rahmadi Tanjung, Skripsi: "*Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah*" (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018)

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, definisi konseptual, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori tentang Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga yang berisi tentang pengertian komite sekolah, tujuan komite sekolah, fungsi komite sekolah, peran komite sekolah, keanggotaan dan kepengurusan komite sekolah, hubungan sekolah dengan komite, pengertian mutu pendidikan, karakteristik mutu pendidikan, standar mutu pendidikan, faktor yang mempengaruhi faktor pendidikan.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi identitas sekolah, sejarah singkat, visi dan misi, keadaan peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, profile komite sekolah, tujuan pembentukan komite sekolah, keanggotaan komite sekolah.

Bab V adalah penutup, bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan yang dilihat dari uraian hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran. Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara umum kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan, yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.

Menurut Syaiful Sagala, komite sekolah merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas di daerahnya.¹³ Nanang Fatah memberikan pengertian tentang komite sekolah dalam bukunya, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, “Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokrasi oleh para stake holders pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan”.¹⁴

Lebih lanjut oleh Djam'an Satori dalam bukunya Mulyono, mengatakan bahwa “komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah.”¹⁵

¹³ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 251.

¹⁴ Nanang Fatah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), hlm. 149.

¹⁵ Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 258.

2. Tujuan Komite Sekolah

Tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di madrasah.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- c. Menciptakan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu dalam sekolah.¹⁶

Selain itu, dalam bukunya Engkoswara yang berjudul *Administrasi Pendidikan* menjelaskan tujuan komite sekolah, yaitu:

- a. Mewadahi dan meningkatkan peranserta para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sekolah, pengembangan program sekolah, monitoring pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, dan pertanggung jawaban mutu pendidikan sekolah secara demokratis dan transparan.
- b. Mewadahi dan meningkatkan peranserta para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi sekolah, dan membantu pemerintah memonitoring pengelolaan pendidikan di sekolah.
- c. Memfasilitasi upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme kepala sekolah, guru, dan staf lain yang terlibat dalam proses pendidikan anak sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah.
- d. Menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sekolah dalam upaya meningkatkan proses belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung belajar yang baik, pengadaan dan

¹⁶ H.E Mulyasa, *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 128.

pemeliharaan fasilitas sekolah yang baik, dan peningkatan kualitas staf yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

- e. Mengembangkan dan menetapkan program kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat, kebutuhan dan tuntutan global, serta berbagai inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.
- f. Memfasilitasi dan mengontrol penerapan sistem manajemen sekolah yang transparan dan demokratis dalam pendayagunaan berbagai sumber daya yang tersedia sesuai dengan prioritas kebutuhan pelaksanaan program sekolah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.¹⁷

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang tujuan dibentuknya komite sekolah ialah sebagai wadah masyarakat untuk menyalurkan pendapatnya terhadap setiap kebijakan yang akan diambil oleh sekolah. Dengan masyarakat ikut andil dalam setiap kebijakan sekolah maka dapat menciptakan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap sekolah.

3. Fungsi Komite Sekolah

Banyak pendapat para ahli yang memberikan pandangan terkait fungsi komite sekolah. Fungsi Komite Sekolah menurut Mulyasa dalam buku *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik* mengemukakan bahwa fungsi dari komite sekolah yaitu:

- a. Memberi pertimbangan (advisory agency) dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan melaksanakan kebijakan pendidikan.
- b. Mendukung (supporting agency) kerja sama sekolah dengan masyarakat, baik secara finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.

¹⁷ Engkoswara, Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm. 298.

- c. Mengontrol (controlling agency) kerja sama sekolah dengan masyarakat dan output pendidikan.
- d. Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/legislatif), dengan masyarakat.
- e. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- f. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi, dunia kerja, pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- g. Menyampaikan masukan, pertimbangan, usulan kepada pemerintah daerah, yang berhubungan dengan kebijakan dan program pendidikan.¹⁸

Lebih lanjut oleh Djam'an Satori yang dikutip oleh Mulyono, menjelaskan fungsi komite sekolah sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan strategi sekolah, yaitu strategi pengembangan sekolah dalam perspektif 3-4 tahun mendatang.
- b. Penyusunan perencanaan tahunan sekolah, yang merupakan elaborasi dari perencanaan strategi sekolah.
- c. Mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah.
- d. Memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan bagi pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah sesuai dengan aspirasi stakeholder sekolah.
- e. Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring (school self-assesment) dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah.

¹⁸ Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2007), hlm. 63.

- f. Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/ institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu (quality assurance) serta memelihara kondisi pembelajaran sekolah sesuai dengan tuntutan standar minimum kompetensi siswa (basic minimum competency) seperti yang diatur dalam PP No.2 tahun 2000.
- g. Membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh penerimaan komite sekolah.
- h. Memantau kinerja sekolah, yang meliputi manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar-mengajar termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar siswa, disiplin dan tata tertib sekolah, prestasi sekolah, baik dalam aspek intra maupun ekstrakurikuler.¹⁹

Dari penjelasan mengenai fungsi komite sekolah dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komite sekolah menyebabkan lahirnya tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat dalam membangun pendidikan. Sehingga masyarakat dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di satuan pendidikan.

4. Peran Komite Sekolah

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara orangtua, masyarakat dan pemerintah. Namun sampai saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Bisa dikatakan tanggungjawab stakeholder masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada BAB XV pasal 56 dikemukakan:

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program

¹⁹ Kompri, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 368

- pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
 - c. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.²⁰

5. Keanggotaan dan Kepengurusan Komite Sekolah

a. Keanggotaan komite sekolah

Keanggotaan komite sekolah sebagaimana dijelaskan H.E. Mulyasa dalam bukunya yang berjudul “Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah” terdiri atas 3 unsur, yaitu: pertama, unsur masyarakat dapat berasal dari: orangtua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga kependidikan, wakil alumni, dan wakil peserta didik. Kedua, unsur komite guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah (maksimal 3 orang). Ketiga, anggota komite sekolah, sekurang-kurangnya berjumlah 9 orang, dan jumlahnya gasal.²¹

Dari yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keanggotaan komite sekolah berasal dari tiga unsur, yaitu masyarakat, komite guru, dan anggota komite sekolah.

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (<https://kemenag.co.id/file/dokumen/UU2003.pdf>), diakses tanggal 12 Agustus 2022 jam 21.00.

²¹ H.E Mulyasa, *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 128.

b. Kepengurus komite sekolah

Kepengurusan komite sekolah sebagaimana dijelaskan Bedjo Sujanto dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah”, yaitu: pertama, struktur kepengurusan organisasi sekurang-kurangnya ketua, sekretaris, dan bendahara. Kedua; dapat dibentuk bidang atau seksi sesuai kebutuhan. Ketiga, pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah. Keempat, ketua bukan dari kepala satuan pendidikan. Kelima, masa kerja ditetapkan dalam AD/ART. Keenam: dapat dibantu oleh narasumber.²²

Dari yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan yang telah terpilih secara musyawarah.

6. Hubungan Sekolah dengan Komite (Masyarakat)

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat karena sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial yang mengambil siswanya dari masyarakat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi komite sekolah, diharapkan mampu mengoptimalkan peran serta orang tua murid dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan.

Menurut Wahyosumidjo dalam bukunya Kepemimpinan Sekolah menjelaskan bahwa tujuan pokok pengembangan hubungan efektif

²² Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2007), hlm. 64

dengan masyarakat setempat, adalah untuk memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan pendidikan sekolah.²³

Dengan adanya hubungan sekolah dan masyarakat dapat mengoptimalkan peran serta komite, hal ini diperjelas oleh pendapat Syaiful Sagala hal tersebut akan mampu mengoptimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan dan menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan.²⁴

Adanya komunikasi yang baik diharapkan akan terciptanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi komite sekolah yang saling bersinergis. Dengan saling bersinerginya hubungan sekolah dan masyarakat, maka diharapkan masyarakat mampu membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Peran serta dukungan dari masyarakat sangat membantu sekolah dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah.

B. Mutu Pendidikan

Masalah mutu pendidikan merupakan salah satu masalah nasional yang sedang dihadapi dan dapat perhatian sungguh-sungguh dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dewasa ini. Mutu merupakan salah satu tujuan pencapaian bagi organisasi atau lembaga yang bergerak pada bidang perdagangan atau jasa, karena mutu bisa menjadi tolok ukur keberhasilan bagi organisasi atau lembaga. Namun pada kenyataannya pandangan setiap orang terhadap mutu dapat berbeda, hal ini karena mutu yang sifatnya relatif bisa berbeda pada setiap pandangan atau pemikiran seseorang dan dapat berubah-ubah.

²³ Wahyusumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 334.

²⁴ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 295.

Pada pembahasan ini akan diuraikan pengertian mutu pendidikan secara terpisah.

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Pengertian mutu pendidikan dalam skripsi ini akan penulis jelaskan masing-masing pengertiannya berdasarkan pendapat para ahli. Berikut uraiannya:

Sallis mendefinisikan mutu dalam dua perspektif, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Mutu absolut merupakan sebagai tolok ukur terbaik menurut penyedia barang atau jasa. Sedangkan mutu relatif merupakan pengukurannya terhadap barang atau jasa tergantung pada konsumen.

Penilaian terhadap mutu adalah bagaimana suatu produk atau jasa yang memenuhi kriteria atau standar. Menurut Juran yang dikutip oleh Jerome S. Arcaro barang atau jasa bisa dikatakan bermutu ketika sudah dinilai atau dirasakan oleh yang menggunakannya.

Seperti yang diungkapkan oleh Goetsch dan Davis dalam bukunya Engkoswara, bahwa mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi sebuah harapan.²⁵

Lebih lanjut oleh Crosby yang dikutip oleh Engkoswara, berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian individual terhadap persyaratan/tuntutan.²⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu adalah suatu ukuran untuk menyatakan esensi suatu benda atau hal yang berupa standar ideal yang ingin dicapai oleh suatu proses. Sedangkan Pendidikan dalam Undang-Undang Pendidikan No. 20 tahun 2003, bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

²⁵ Engkoswara, Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm. 304

²⁶ Engkoswara, Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm. 305

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”²⁷

Menurut Lengeveld dalam bukunya Alisuf Sabri pendidikan adalah semua usaha yang bertujuan untuk membantu anak didiknya agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban hidupnya secara mandiri.²⁸

Lebih lanjut seperti yang diungkapkan oleh John Dewey dalam bukunya Zurinal, menurutnya “pendidikan sebagai suatu rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman agar lebih bermakna, sehingga pengalaman tersebut dapat mengarahkan pengalaman yang didapat berikutnya.”²⁹

Dari beberapa pengertian menurut pandangan dari beberapa para ahli, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa pendidikan merupakan pemberian bimbingan atau bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, menuju kesempurnaan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masa kini dan masa yang akan datang. Menurut Suryadi mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga-lembaga pendidikan dan satuan pendidikan dalam mengelola dan mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar.³⁰

Selanjutnya, mutu pendidikan juga dikemukakan oleh Ridwan Abdullah Sani dkk di dalam buku Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, bahwa “mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan”.³¹

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (<https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf>) . Diakses tanggal 31 Agustus 2022 pukul 11: 56.

²⁸ H.M Alisuf Sabri, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.I, hlm. 8.

²⁹ Zurinal dan Wahdi Sayuti, *Ilmu Pendidikan: Pengantar dan Dasar-dasar Pelaksanaan Pendidikan*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), Cet.1, hlm. 2.

³⁰ Sam M. Chan & Pro. Emzir, *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 4.

³¹ Ridwan Abdullah Sani dkk, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 6.

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu pendidikan merupakan suatu konsep yang bisa berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan hasil pendidikan, yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat pada wujud pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sehingga, mutu pendidikan tidak terlepas dari seperangkat pelaksana pendidikan, karena perangkat pelaksana pendidikan memiliki lingkup kegiatan yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran.

2. Karakteristik Mutu Pendidikan

Menurut Sri Minarti dalam bukunya *Manajemen Sekolah*, ada beberapa karakteristik mutu pendidikan, yakni sebagai berikut:

- a. Tidak Berwujud (Intangibility), seperti produk fisik, yang menyebabkan pengguna jasa pendidikan tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasilnya sebelum mereka mengonsumsinya (menjadi subsistem lembaga pendidikan).
- b. Tidak Terpisahkan (Inseparability), jasa pendidikan tidak dapat terpisahkan dari sumbernya, yaitu lembaga pendidikan yang menyediakan jasa tersebut.
- c. Bervariasi (Variability), jasa pendidikan yang diberikan sering berubah-ubah. Hal ini akan sangat tergantung kepada siapa yang menyajikannya, kapan, serta di mana disajikannya jasa pendidikan tersebut.
- d. Mudah Musnah (Perishability), jasa pendidikan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu atau jasa pendidikan tersebut mudah musnah sehingga tidak dapat dijual pada waktu mendatang.³²

Selanjutnya menurut Gronroos dalam bukunya Engkoswara, karakteristik mutu pendidikan meliputi enam unsur yaitu:

- a. Professionalism and skills, kriteria utama pada jasa yang bermutu.

Para pelanggan percaya bahwa SDM penyedia jasa memiliki syarat

³². Sri Miniarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), hlm. 330-332.

profesionalisme dan keahlian yang mempunyai sekaligus dapat menghasilkan produk yang bermutu.

- b. Attitude and behavior, sikap dan perilaku yang ditunjukkan personil penyedia jasa dalam melayani atau melaksanakan proses sangat empatik dan siap membantu pelanggan.
- c. Accessibility and flexibility, proses dirancang secara fleksibel untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan akses.
- d. Reliability and trustworthiness, reputasi baik dan selalu menjaga kepercayaan pelanggan membuat para pelanggan percaya dan yakin dengan apa yang diberikan penyedia jasa adalah suatu pelayanan yang bermutu.
- e. Recovery, saat terjadi kesalahan atau kekeliruan, pelanggan tidak terlalu cemas dan khawatir karena mereka percaya penyedia jasa dapat membantu memecahkan masalahnya.
- f. Reputation and credibility, image yang dibuat penyedia jasa adalah menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan.³³

Lebih lanjut, menurut M.N Nasution, karakteristik mutu pendidikan yaitu:

- a. Kinerja/performa (performance), berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan konsumen ketika ingin membeli suatu produk, yaitu karakteristik pokok dari produk inti.
- b. Features, merupakan aspek kedua performa yang menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya, yaitu ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau karakteristik pelengkap/tambahan.
- c. Keandalan (reliability), berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu.

³³ Engkoswara, Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm. 305.

- d. Konformitas (conformance), berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.
- e. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan.
- f. Kemampuan pelayanan (serviceability), merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta penanganan keluhan yang memuaskan.
- g. Estetika (aesthetics), merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual.
- h. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), karakteristik yang berkaitan dengan reputasi (brand name, image).³⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya karakteristik mutu pendidikan berorientasi pada kebutuhan pelanggan pada saat ini dan dimasa yang akan mendatang. Agar dapat mewujudkan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan, harus dengan keterlibatan dan kemampuan yang dimiliki oleh pimpinan dan kerjasama dengan sumber daya manusia yang mempunyai agar terciptanya pelayanan yang maksimal kepada pelanggan pendidikan.

3. Standar Mutu Pendidikan

Menurut IIEP-UNESCO, *Understanding and Assesing Quality* yang dikutip oleh Ridwan dkk dalam bukunya *Penjaminan Mutu Sekolah*, bahwa pendekatan yang digunakan dalam menetapkan standar mutu, diantaranya: (a) berbasis standar (standard-based), yakni lembaga harus menampilkan mutu berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya; (b) kecocokan dengan tujuan (fitness for purpose), yakni mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga berdasarkan prosedur yang dapat mendukung untuk pencapaian tujuan tertentu; (c) standar minimal,

³⁴ Sri Miniarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), hlm.334-335.

yakni lembaga menentukan spesifikasi minimal yang harus dicapai; (d) standar optimal, yakni lembaga menggunakan ukuran-ukuran terbaik yang harus dicapai.³⁵

Didalam PP 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang dijadikan sebagai acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Delapan standar tersebut, ialah:

- a. **Standar isi.** Mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, bahan belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
- b. **Standar proses.** Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- c. **Standar kompetensi lulusan.** Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- d. **Standar pendidik dan tenaga kependidikan.** Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- e. **Standar sarana dan prasarana.** Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses

³⁵ Ridwan Abdullah Sani dkk, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 10.

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- f. **Standar pengelolaan.** Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- g. **Standar pembiayaan.** Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.
- h. **Standar penilaian pendidikan.** Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; 2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: 1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan 2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.³⁶

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa standar mutu pendidikan merupakan suatu yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus diterapkan dan dilaksanakan guna terciptanya mutu pendidikan yang berkualitas. Sehingga nantinya akan berdampak langsung pada kepuasan pelanggan pendidikan baik internal maupun eksternal yang tidak terlepas dari delapan standar nasional pendidikan.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

³⁶ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm.280- 282.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sedangkan sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memperhatikan.

Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan menjadi agenda utama semua birokrasi pendidikan, semua komponen yang ada di sekolah, semua orang tua dan wali murid, serta pihak-pihak lainnya yang memiliki jaringan langsung atau tidak terhadap dunia pendidikan. Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh banyak pihak, apakah pemerintah, masyarakat, sekolah, orangtua dan siswa itu sendiri.

Sedikitnya ada empat faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Berikut pembahasan menurut Maslikhah: Pertama, fungsi dan tujuan pendidikan kurang melekat pada pelaksana dan pelaksanaan pendidikan. Kedua, prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kegamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa tidak dijadikan sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi. Ketiga, pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan bersifat hanya *lips service*. Keempat, evaluasi pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada public seringkali dibelokkan dengan kepentingan tertentu.³⁷

³⁷ Maslikhah, Quo Vadis, *Pendidikan Multikultur; Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2007), hlm. 88-89.

Menurut Isjoni, pembangunan pendidikan hendaknya diarahkan kepada beberapa faktor yang merupakan kebutuhan mendasar, diantaranya yaitu:

- a. *Pertama*, sarana dan prasarana pendidikan, meliputi pembangunan ruang belajar, renovasi dan rehabilitasi ruang belajar beserta perangkat pendukungnya, ruang laboratorium, perpustakaan, komputer, pusat sumber belajar, dan termasuk rumah guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, WC guru dan murid.
- b. *Kedua*, sarana dan prasarana pembelajaran, berkaitan dengan pengadaan alat dan media pembelajaran, untuk bidang IPA, IPS, Bahasa, dan bidang lainnya. Selanjutnya seperangkat alat praktek laboratorium (IPA, Matematika, IPS, Bahasa), buku-buku pegangan guru dan siswa di semua jenjang dan jenis pendidikan, serta buku-buku untuk perpustakaan.
- c. *Ketiga*, Pembangunan sumber daya manusia.
- d. *Keempat*, Pembangunan sektor Pendidikan Luar Sekolah.
- e. *Kelima*, pembangunan life skill, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA.³⁸

Sedangkan dalam bukunya Sri Minarti yang berjudul Manajemen Sekolah, untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (school based management), yaitu sekolah diberikan kewenangan untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan.
- b. Pendidikan yang berbasiskan pada partisipasi (community based education) ketika terjadi interaksi yang positif antara sekolah dan masyarakat, sekolah sebagai community learning center.

³⁸ Isjoni, Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 23.

- c. Dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigm yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau learner menjadi manusia yang diberdayakan.³⁹

Lebih lanjut, dalam bukunya Mujamil Qomar menjelaskan bahwa faktor yang memberikan kontribusi terhadap mutu, yaitu:

- a. Siswa, terutama yang menyangkut kesiapan dan motivasi belajarnya.
- b. Guru, terutama menyangkut kemampuan profesional, moral kerja (kemampuan personal), dan kerja samanya (kemampuan sosial).
- c. Kurikulum, terutama yang menyangkut relevansi isi dan operasionalisasi proses pembelajarannya.
- d. Dana, sarana, dan prasarana, terutama menyangkut kecukupan dan efektivitas dalam mendukung proses pembelajaran.
- e. Masyarakat (orangtua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi) terutama menyangkut partisipasi mereka dalam pengembangan program-program pendidikan di sekolah.⁴⁰

Dari semua pendapat para ahli yang telah dipaparkan di atas dapat penulis simpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan menitik beratkan pada pengembangan komponen-komponen yang ada di dalam satuan pendidikan dan pembangunan mutu secara keseluruhan mulai dari pemerintah, sekolah dan masyarakat atau stakeholder pendidikan, agar dalam proses peningkatan mutu pendidikan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan baik dari aparatur pemerintah maupun satuan pendidikan itu sendiri. Faktor penentu atas keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan juga ditentukan atas kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran, bagaimana guru akan mengajar lebih efektif, dan hasil belajar peserta didiknya baik, kalau sarana pembelajaran dalam kelas tidak tersedia. Ini jelas akan menjadi kebijakan pemerintah, karena itu tugas pemerintah untuk menyediakan

³⁹ Sri Miniarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), hlm. 348.

⁴⁰ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 205.

sarana pembelajaran di kelas yang diperlukan oleh guru. Seperangkat pembelajaran tersebut sangat menentukan dalam mewujudkan mutu pendidikan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (*holistic*) tanpa mengisolasi individu dan organisasinya dalam variabel tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁴¹ Penelitian kualitatif sering pula disebut metode etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik.

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan menjabarkannya, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna yang menjadi instrumennya adalah penelitian itu sendiri.⁴² Secara umum, penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip deskriptif analitik/ analisis deskriptif. Analisis deskriptif dipahami sebagai suatu bentuk analisis yang ditujukan kepada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang. Dikatakan analitik karena pada penelitian ini intinya adalah menganalisa peranan komite dalam meningkatkan mutu pendidikan, faktor-faktor yang mendorong dan faktor-faktor yang menghambat peranan komite dalam meningkatkan mutu pendidikan tersebut.⁴³

Penelitian ini adalah menganalisa peran komite dalam peningkatan mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga. Oleh karena itu metode yang dianggap cocok adalah pendekatan kualitatif melalui metode kualitatif ini

⁴¹ Loexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 38

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 38

diharapkan mampu memperoleh gambaran tentang bagaimana peranan komite dalam peningkatan mutu pendidikan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MI Negeri 1 Purbalingga yang berada di Desa Kragean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Adapun terkait dengan waktu penelitian yang dilakukan yaitu mulai dengan melakukan observasi pendahuluan pada 25 November 2021, kemudian peneliti melakukan riset individual pada bulan Juli sampai bulan September 2022.

Peneliti memilih penelitian di MI N 1 Purbalingga karena Saat ini MI Negeri 1 Purbalingga merupakan salah satu Madrasah Ibtidaiyah unggulan di Purbalingga yang dianggap menjadi rujukan dan pilihan masyarakat karena kualitas pendidikannya yang tidak diragukan lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari status sekolah yang memiliki Akreditasi A serta prestasi akademik dan non akademik yang diraih oleh siswa dan sekolah sehingga membuat sekolah tersebut baik dan menjadi sorotan masyarakat. Namun dilain hal, komite sekolah masih belum maksimal dalam menjalankan perannya sesuai dengan seharusnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan tidak ikut serta dalam memberikan masukan pada kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidik. Sebagai pendukung, komite sekolah sudah menjalankan perannya dengan baik. Sebagai pengontrol, komite sekolah hanya mengawasi program sekolah serta pendanaan yang dipakainya. Serta sebagai mediator, komite sekolah hanya sebagai penyalur informasi ke orang tua siswa terkait program dan kegiatan di sekolah.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian kualitatif adalah narasumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai keinginan peneliti tentang masalah yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat, peneliti mengambil beberapa subjek penelitian yang meliputi:

- a. Ketua komite
 - b. Kepala sekolah
 - c. Guru
 - d. Wali murid
2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi tujuan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian untuk mengumpulkan beberapa data yang akan dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya :

1. Wawancara

Penulis mewawancarai secara langsung pihak-pihak yang terkait guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program kerja komite sekolah, tanggung jawab komite sekolah, peran komite sekolah, tantangan yang dihadapi komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga. Yang akan diwawancarai adalah ketua komite sekolah, kepala sekolah, guru dan wali murid.

2. Observasi

Teknik observasi di mana peneliti mengumpulkan data dengan mencatat sesuai situasi dan kondisi selama penelitian.⁴⁴ Dari segi proses pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi participant observation dan non participant observation. Sedangkan dari segi instrument dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Secara rinci sebagai berikut:

⁴⁴ Gulo W, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 79.

- a. Observasi Berperanserta (Participant Observation) Dimana dalam observasi ini peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang menjadi sumber data penelitian.
- b. Observasi Non Partisipan Dalam observasi ini, peneliti tidak andil dalam kegiatan tetapi hanya sebagai pengamat kegiatan.
- c. Observasi Terstruktur Observasi ini telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana lokasi penelitian.
- d. Observasi Tidak Terstruktur Jenis observasi ini adalah observasi yang dimana belum dirancang secara sistematis, karena peneliti belum tahu pasti hal apa yang akan diamati.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, dimana observer tidak andil dalam kegiatan, hanya berperan mengamati kegiatan. Strategi dilakukan oleh penulis bermaksud memperoleh data dan keterangan visual yang mengidentifikasi dengan kondisi, struktur organisasi. Observasi ini dapat mengumpulkan informasi secara cermat, lengkap dan benar serta bermanfaat untuk pelengkap informasi yang belum diperoleh. Yang diperhatikan adalah seluruh aspek mengenai peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di MI N 1 Purbalingga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, dapat berupa karya, tulisan, film maupun gambar.⁴⁶ Teknik dokumentasi digunakan untuk meningkatkan informasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan informasi berupa foto-foto kegiatan rapat antara pihak komite sekolah dengan pihak sekolah.

Secara rincinya teknik ini dipakai untuk memperoleh data tentang:

- a. Profil MI N 1 Purbalingga.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 203- 205.

⁴⁶ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Vol. XIII No. 2 (Juni 2014), hlm. 181

- b. Visi Misi MI N 1 Purbalingga.
- c. Struktur Organisasi komite sekolah dan struktur organisasi MI N 1 Purbalingga.
- d. Keadaan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran di MI N 1 Purbalingga.

E. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Triangulasi menggunakan tiga macam cara dalam pengecekan data yaitu sumber, teknik dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti mendapatkan informasi dari berbagai sumber dengan teknik yang sama. Data atau sumber di dapat dari empat sumber yakni ketua komite sekolah, kepala sekolah, guru dan wali murid MI Negeri 1 Purbalingga.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi ini menguji sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini peneliti dalam pengambilan data dilakukan dengan tiga macam teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi di MI Negeri 1 Purbalingga.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁴⁷ Peneliti menggunakan triangulasi waktu guna menguji kredibilitas data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam waktu dan hari yang berbeda.

Tiga triangulasi dalam penelitian dilakukan dengan mencocokkan hasil temuan lapangan yang didapat dari observasi dengan hasil wawancara kepada ketua komite, kepala sekolah, guru dan wali murid

⁴⁷ Ahmad Rijali, "Analisis data kualitatif ", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (Januari-Juni 2018), hlm. 84.

MI Negeri 1 Purbalingga dan didukung dokumentasi sehingga ditemukan hasil dari observasi guna sebagai bahan penulisan skripsi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif untuk mendapatkan deskripsi keadaan terbaru. Menurut Noeng Muhadjir sebagaimana dikutip Ahmad Rijali bahwa analisis data sebuah upaya mencari dan menata catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk menambah pemahaman peneliti mengenai masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan mencari makna.⁴⁸

Penelitian menggunakan analisis data dengan model Milles & Huberman yang mencangkup tiga analisis yaitu:

1. Reduksi Data

Merupakan tahap dalam pengumpulan semua data yang diperlukan dari hasil observasi dan uji coba yang kemudian dikelompokkan datanya.

2. Display Data

Display data merupakan keterbukaan data yang diperlukan dalam penelitian. Display data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, flowcart dan lain-lain. Untuk penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah teks naratif.

3. Verifikasi atau kesimpulan

Merupakan tahap penjelasan data penelitian untuk ditarik sebuah kesimpulan bersandarkan fakta yang diperoleh dari hasil observasi lapangan.⁴⁹

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif...*, hlm. 315

⁴⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

BAB IV

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MI NEGERI 1 PURBALINGGA

A. Gambaran Umum MI Negeri 1 Purbalingga

1. Identitas Sekolah

- a. Nama Madrasah : MI Negeri 1 Purbalingga
- b. Alamat :Jalan Raya Krangean RT 01/I Krangean
Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga 53358
- c. NPSN : 60710624
- d. No Statistik Madrasah : 111133030001
- e. Akreditasi : A
- f. Status Madrasah : Negeri⁵⁰

Berdasarkan dari keterangan identitas sekolah diatas bahwa MI Negeri 1 Purbalingga mweupakan Madrasah Aliyah yang berstatus negeri, yang memiliki Akreditasi A.

2. Sejarah singkat MI Negeri 1 Purbalingga

MI Negeri 1 Purbalingga merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar yang berciri khas Islam. Dahulu sekolah ini dinamakan Madrasah Diniyah atau Sekolah Arab yang berdiri pada tahun 1947, tokoh pendirinya adalah Bapak Djamaludin, seorang alumnus Pondok Pesantren Jampes Jawa Timur, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Krangean. Diawali dengan adanya keinginan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan pendidikan khususnya dalam bidang agama Islam, maka pada tahun 1957 Madrasah Diniyah Krangean diubah menjadi Madrasah Wajib Belajar (MWB).

Perubahan ini merupakan kesepakatan antara pengurus madrasah dengan para tokoh masyarakat(pemuka agama) yang menginginkan

⁵⁰ Observasi, di MI Negeri 1 Purbalingga,21 Agustus 2022.

adanya lembaga pendidikan dasar yang berciri khas Islam di Desa Kragean.

Madrasah Diniyah Kragean pada waktu itu menempati gedung Sekolah Rakyat II Picung. Animo masyarakat yang begitu kuat menyebabkan jumlah murid melebihi jumlah kapasitas ruangan, sehingga para pengajar mengambil keputusan untuk memisahkan murid yang dianggap sudah memahami huruf hijaiyah di kediaman Bapak Atmorejo, warga desa setempat. Adapun tenaga pengajarnya diambil dari tokoh agama dan pemuda setempat yang memiliki pengetahuan ilmu agama terutama para alumnus pondok pesantren. Pada tahun 1948 terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya "*barisan bengseng*", mereka merusak dan membakar rumah-rumah penduduk termasuk rumah kepala desa Batur dan Kragean. Gedung Sekolah Rakyat II Picung yang ditumpanginya Madrasah Diniyah pun ikut menjadi korban pembakaran tersebut. Sehingga Madrasah Diniyah dipindah ke rumah Bapak Madhalil dan sebagian ditempatkan di Masjid Jami' Picung.

Berkat usaha gigih Bapak Djamaludin dan para pengurus dalam memajukan pendidikan Islam, maka pada tahun 1950 dibangunlah gedung Madrasah Diniyah baru di atas tanah wakaf Ny. Djamaludin yang sekarang lokasinya dibangun Gedung I MI Negeri 1 Purbalingga. Tahap berikutnya pada tahun 1957 Madrasah Diniyah Kragean mengalami perubahan dan mulai diakui oleh jajaran Departemen Agama dan diganti namanya menjadi Madrasah Wajib Belajar Nahdlatul 'Ulama (MWBNU). Langkah demi langkah kemajuan dan perkembangan dapat dicapai oleh MWBNU, itu dapat dilihat dengan usaha pengurus untuk menambah fasilitas gedung agar dapat menampung murid kelas I sampai dengan kelas VI.⁵¹

⁵¹ Dokumentasi, di MI Negeri 1 Purbalingga, 21 Agustus 2022.

3. Visi dan Misi MI Negeri 1 Purbalingga

a. Visi

Terwujudnya peserta didik yang religius, disiplin, berilmu, peduli lingkungan, dan unggul.

b. Misi

- a) Mewujudkan pembentukan karakter islami pada peserta didik yang mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari;
- b) Menyelenggarakan pembelajaran dan pembiasaan disiplin di lingkungan madrasah pada semua kegiatan;
- c) Menyelenggarakan pendidikan yang profesional, yang selalu berorientasi pada peserta didik yang menguasai ilmu dan agama;
- d) Menyelenggarakan pendidikan yang mengarah pada pembentukan siswa yang mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan;
- e) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang tepat dan dapat merangsang peserta didik aktif serta kreatif;
- f) Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga pendidik sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan;
- g) Mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan islami dalam mencapai prestasi dan berdaya saing peserta didik;
- h) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Visi dan misi dari MI Negeri 1 Purbalingga.

4. Tujuan MI Negeri 1 Purbalingga

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar yang mengacu pada tujuan umum pendidikan dasar yaitu meletakkan dasar kecerdasan , pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih

lanjut. Sedangkan secara khusus sesuai dengan Visi dan Misi Madrasah, MI Negeri 1 Purbalingga mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peserta didik yang berkepribadian Islami baik di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah
- b. Pada akhir tahun pelajaran peserta didik hafal asmaul husna c. Pada akhir tahun pelajaran peserta didik kelas 6 hafal juz 30
- c. Peserta didik dapat membaca Al Qur'an dengan baik dan benar
- d. Seluruh peserta didik sadar untuk menjalankan sholat wajib lima waktu
- e. Terwujudnya peserta didik yang memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam kehidupannya.

5. Keadaan peserta didik di MI Negeri 1 Purbalingga

- a. Jumlah peserta didik

RINCIAN JUMLAH SISWA⁵² TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023

No	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah per-Rombel	Jumlah per-Kelas
		L	P		
1	I-A	14	14	28	
2	I-B	14	14	28	56
3	I-C	15	13	28	56
4	I-D	13	15	28	112
5	II-A	13	14	27	
6	II-B	14	14	28	53
7	II-C	14	14	28	58
8	II-D	12	16	28	111
9	III-A	14	14	28	
10	III-B	13	15	28	60
11	III-C	16	12	28	52
12	III-D	17	11	28	112
13	IV-A	12	14	26	
14	IV-B	15	12	27	54

⁵² Dokumentasi, di MI Negeri 1 Purbalingga, 21 Agustus 2022.

NO	KELAS	Laki laki	Perempuan	Jumlah per rombel	Jumlah perkelas
15	IV-C	15	12	27	52
16	IV-D	12	14	26	106
17	V-A	14	12	26	
18	V-B	15	13	28	58
19	V-C	15	12	27	50
20	V-D	14	13	27	108
21	VI-A	14	12	26	
22	VI-B	14	14	28	56
23	VI-C	14	12	26	50
24	VI-D	14	12	26	106
Jumlah		337	318	655	

6. Tenaga Pendidik di MI Negeri 1 Purbalingga

Ditinjau dari sumber manusia (SDM) yang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pada tahun ajaran 2021/2022 MI Negeri 1 Purbalingga memiliki tenaga pengajar sebanyak 29. Pendidik memiliki kualifikasi S1 dan S2 dan mata pelajaran yang diampu sesuai dengan bidang kualifikasinya masing-masing. Terdapat 26 Guru PNS dan 3 guru Honorar.⁵³

7. Sarana dan Prasarana MI Negeri 1 Purbalingga

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki MIN 1 Purbalingga berdasarkan hasil penelusuran dokumentasi yang penulis peroleh adalah sebagai berikut :

1) Tanah dan Bangunan

- a. Luas tanah yang dimiliki : 2.827 m²
- b. Luas tanah yang bersertifikat : 2.827 m²
- c. Luas bangunan : 1.393 m²

⁵³ Dokumentasi, di MI Negeri 1 Purbalingga, 21 Agustus 2022.

2) Ruang dan Gedung

KEADAAN PRASARANA GEDUNG MIN 1 PURBALINGGA⁵⁴

No.	Jenis	Jumlah
1.	Ruang kelas	24 ruang
2.	Ruang kepala madrasah	1 ruang
3.	Ruang guru	1 ruang
4.	Ruang tamu	1 ruang
5.	Ruang perpustakaan	1 ruang
6.	Ruang UKS	2 ruang
7.	Mushola guru	1 ruang
8.	Kamar mandi/toilet guru	4 ruang
9.	Kamar mandi/toilet siswa	15 ruang
10.	Gudang	1 ruang
11.	Dapur	1 ruang

⁵⁴ Dokumentasi, di MI Negeri 1 Purbalingga, 21 Agustus 2022

3) Meubelair

KEADAAN PRASARANA MEUBELAIR MIN 1
PURBALINGGA⁵⁵

No.	Jenis	Jumlah
1.	Meja/kursi kepala	1 set
2.	Meja/kursi guru dan karyawan (ruang guru)	36 set
3.	Meja/kursi guru (kelas)	24 set
4.	Meja siswa	543 buah
5.	Kursi siswa	771 buah
6.	Kursi tamu	2 set
7.	Lemari arsip/kelas	20 buah
8.	Papan tulis	24 buah
9.	Papan Mading	2 buah
10.	Papan Pengumuman	2 buah
11.	Meja/kursi UKS	21 set
12.	Lemari UKS	2 buah
13.	Ranjang UKS	4 buah
14.	Meja sirkulasi perpustakaan	1 set
15.	Meja/kursi baca	20 set
16.	Rak buku	12 Buah

⁵⁵ Dokumentasi, di MI Negeri 1 Purbalingga, 21 Agustus 2022

4) Peralatan dan Inventaris Kantor

**KEADAAN PRASARANA PERALATAN
DAN IVENTARIS KANTOR MIN 1 PURBALINGGA⁵⁶**

No.	Jenis	Jumlah
1.	Telepon	3 buah
2.	Komputer	1 buah
3.	Laptop	30 buah
4.	Televisi	4 buah
5.	LCD Proyektor	12 buah
6.	DVD Player	1 buah
7.	Megaphone	1 buah
8.	Audio kelas	25 set
9.	Sound system	2 set
10.	Mesin stensil	1 buah
11.	Peralatan olahraga	13 set
12.	Peralatan drumband	1 set
13.	Peralatan hadroh	1 set
14.	Peralatan kesenian	2 set
15.	Peralatan UKS	3 set
16.	Papan majalah dinding	13 buah
17.	Papan monografi	9 buah
18.	Alat peraga IPA	53 buah/set
19.	Alat peraga IPS	48 buah/set
20.	Alat peraga Matematika	27 buah/set
21.	Alat peraga Bahasa Indonesia	7 buah
22.	Alat peraga PAI	14 buah/set

⁵⁶ Dokumentasi, di MI Negeri 1 Purbalingga, 21 Agustus 2022

B. Penyajian Data Terkait Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga

1. Profil Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih secara musyawarah yang dibentuk antara pihak sekolah dengan masyarakat khususnya orang tua siswa. Terbentuknya komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga tidak lepas dari Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2913 Tahun 2015. Selain itu, pihak sekolah merasa perlu dibentuknya komite sekolah agar orang tua siswa dapat diajak kerja sama serta berkontribusi secara langsung untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pembentukan komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga dilakukan secara musyawarah dimana diadakannya rapat untuk membahas pembentukan komite sekolah. Namun pada saat ini merupakan kepengurusan baru karena sebelumnya terjadi pergantian ketua komite dan kemudian struktur kepengurusan komite dirubah secara keseluruhan. Hal ini diperjelas oleh Bapak Arif Mutaqin.

*“Pihak sekolah melakukan pergantian komite sekolah dari ketuanya sampai anggotanya, dikarenakan ketua komite sebelumnya merupakan kyai dan beliau sudah terlalu sepuh untuk bisa melanjutkan perannya sebagai ketua komite, kemudian beliau digantikan dengan Bapak Rois Mahfud S.E. Beliau merupakan alumni dari MI Negeri 1 Purbalingga yang diharapkan bisa memajukan mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga”.*⁵⁷

2. Tujuan pembentukan komite

Tujuan pembentukan komite sekolah dilakukan untuk memajukan siswa baik dalam bidang akademik maupun akademiknya. Hal ini diperjelas oleh Bapak Rois Mahfud S.E

“Tujuan utama dibentuknya komite sekolah ialah untuk memajukan siswa baik dalam bidang akademik maupun non akademiknya dan membantu program-program yang ada di sekolah. Program yang ada di sekolah diajukan ke komite, lalu komite

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Mutaqin selaku Guru di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 20 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang Tamu MI Negeri 1 Purbalingga

*mengoreksi terlebih dahulu program yang diajukan tersebut apakah baik dan bermanfaat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini.*⁵⁸



wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E, selaku Ketua Komite MI Negeri 1 Purbalingga

Sekolah berharap dengan adanya komite sekolah, maka komite sekolah dapat membantu program-program yang ada di sekolah, khususnya dalam hal pendanaan yang tidak bisa didanai dengan dana BOS.

3. Keanggotaan komite sekolah

- a. Ketua I : Rois Mahfud, S. E
- b. Ketua II : Dasuki, S. H
- c. Sekretaris : Khamali, S. Ag.
- d. Bendahara : Amrulloh
- e. Anggota :
 - 1) Bidang Pembangunan : Teguh Arifianto, ST.MT dan H. Mukmin.
 - 2) Bidang Humas : Agung Sunarko dan Khulafaur Rosyidin
 - 3) Bidang KewiraUsahaan : Soimun dan Fadil, SH
 - 4) Bidang Kesiswaan : Suwito dan Ustad Eva

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud.

Kepengurusan komite sekolah yang ada di MI Negeri 1 Purbalingga terdiri dari orang tua siswa dan juga tokoh masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua komite sekolah:

*“Dalam kepengurusan kami hanya terdiri dari kalangan orang tua siswa dan tokoh masyarakat. Kepengurusan kami berjumlah 8 orang, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.”*⁵⁹

Penjelasan mengenai struktur komite sekolah dan tugasnya:

- a. Ketua komite sekolah memiliki tugas mengkoordinir seluruh anggotanya untuk berperan aktif dalam menjalankan program-programnya serta membantu program sekolah.
- b. Sekretaris memiliki tugas yang berkaitan dengan administrasi komite.
- c. Bendahara memiliki tugas yang berkaitan dengan keuangan komite dalam menjalankan program komite maupun program sekolah.
- d. Anggota memiliki tugas untuk saling membantu satu sama lain tugas-tugas yang ada baik dari ketua, sekretaris maupun bendahara.

Dalam menjalankan tugasnya seperti yang dituturkan oleh ketua komite sekolah, mereka menjalankannya secara bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Komite sekolah tidak selalu ada di sekolah seperti guru dan tenaga kependidikan yang lain. Komite sekolah memiliki pekerjaan lain diluar pekerjaan mereka sebagai komite sekolah. Komite berada di sekolah hanya ketika dipanggil oleh kepala sekolah, komite sedang mengadakan rapat dengan orang tua siswa, dan ketika komite sedang melakukan pengawasan terhadap program-program sekolah.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud.

4. Peran Komite Sekolah

a. Komite Sekolah Sebagai Badan Pemberi Pertimbangan

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber, maka dapat dilihat peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan. Hal ini diperjelas oleh Ibu Siti Honiah, M.S.i, M.Pd selaku kepala sekolah mengatakan,

*“Peran komite sebagai pemberi pertimbangan sudah baik, seperti komite sekolah ikut memberikan masukan terhadap program-program yang ada di sekolah. Komite sekolah sendiri mempunyai peran sebagai partner dari kepala sekolah untuk mengelola berbagai sumber daya pendidikan yang ada dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan. Kami selalu musyawarah dengan komite sekolah terkait program-program sekolah adapun terkait pemenuhan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi kita akan membahas hal tersebut bersama komite. Hal tersebut karena tidak adanya anggaran dari dana bos maka dari itu kita membahas hal tersebut bersama komite sekolah untuk mensosialisasikan ke wali murid terutama wali murid kelas 6. Dan kami juga tidak akan melaksanakan program apabila komite sekolah tidak menyetujuinya.”*⁶⁰

Selain itu, ditunjang dengan hasil wawancara dengan Bapak Rois Mahfud, S.E selaku ketua komite sekolah yang mengatakan,

*“Komite sekolah sangat berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap program sekolah. Karena setiap awal tahun kepala sekolah memberi tahu programnya ke komite sekolah untuk dibahas bersama dengan komite sekolah. Setelah itu komite menjembatani program itu terkait dengan pembiayaan yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Adapun program komite sekolah sebelumnya tentang kegiatan menghafal dan membaca Asmaul Husna dan kegiatan menghafal juz 30 masih berjalan karena upaya tersebut dapat menanamkan nilai-nilai agama pada diri siswa. Apabila dari program yang diajukan tersebut tidak dapat komite sanggupi maka dialihkan ke tahun berikutnya.”*⁶¹

Selanjutnya hal yang sama dikatakan oleh Bapak Arif Mutaqin selaku guru mengatakan,

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Honiah, S.Ag., M.Pd selaku kepala sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang tamu MI Negeri 1 Purbalingga.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud.

“Ya, komite sekolah terlibat dalam memberikan masukan terkait program di sekolah. Komite sekolah mengikuti rapat yang diadakan oleh sekolah terkait program, kegiatan dan semua kebutuhan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mensejahterakan semua warga sekolah.”⁶²

Selain dalam hal pertimbangan atau masukan pada program sekolah, bentuk pemberian pertimbangan lainnya adalah dalam hal pemberian pertimbangan terhadap penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, Ibu Siti Honiah selaku kepala sekolah mengatakan,

“Komite sekolah ikut serta dalam memberikan pertimbangan serta masukan terhadap penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang tidak dibiayai oleh pemerintah/ dana BOS. Komite memberikan pertimbangan terhadap kriteria sarana dan prasarana sekolah terkait apa saja yang dibutuhkan sekolah, dan mana saja yang harus diperbaiki seperti penambahan ruang kelas, pengadaan pagar besi bangunan baru adapun program sebelumnya pengadaan ruang komputer. Komite sekolah juga dilibatkan dalam penyusunan KTSP bersama guru dan karyawan”.⁶³

Selanjutnya, Pak Rois Mahfud selaku komite sekolah mengatakan,

“Dalam penyediaan sarana dan prasarana di sekolah ini, komite sekolah sangat terlibat. Supaya sarana dan prasarana di MI Negeri 1 Purbalingga dapat terpenuhi guna untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah, karena tidak semua fasilitas ataupun sarana dan prasarana dianggarkan lewat dana BOS, pihak komite juga di ikutsertakan dalam penyusunan KTSP dan mengesahkannya bersama kepala sekolah dan pihak sekolah lainnya”.⁶⁴

Adapun bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang kurang adalah program pengadaan lahan lapangan karena MI Negeri 1 Purbalingga belum mempunyai lapangan untuk upacara, hal ini diperjelas oleh Bapak Rois Mahfud S.E,

"Untuk rencana selanjutnya itu pengadaan lahan lapangan, karena lapangan yang dulu digunakan untuk upacara maupun olah raga sudah digunakan untuk pembangunan gedung baru. Kami ingin merealisasikan hal tersebut supaya siswa siswi MI Negeri 1

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Mutaqin selaku Guru di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 20 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang Tamu MI Negeri 1 Purbalingga

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Honiah, S.Ag, M.Pd selaku kepala sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang tamu MI Negeri 1 Purbalingga.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud

Purbalingga bisa mengadakan upacara karena selama ini setelah gedung baru jadi belum diadakannya upacara disekitar sekolah".⁶⁵ Hal itu dibenarkan adanya sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah,

"Untuk pengadaan lahan lapangan memang benar adanya kita telah bermusyawarah dengan komite terkait itu, dan alhamdulillah pada 1 oktober 2022 hal tersebut terlaksana, lahan tersebut adalah lahan desa dan sistemnya kita sewa selama setahun dan besar kemungkinan akan berlangsung ke tahun selanjutnya"⁶⁶

Adapun hal lain yang disampaikan oleh Bapak Makhmud Hidayat Santosa, S.Pd.I,

"Untuk program dari komite setiap tahunnya pasti ada mas, terutama untuk kelas 6 setiap tahunnya pasti ada pemenuhan sarana prasaranayang kurang. Contohnya tahun kemarin kita bersama komite bermusyawarah terkait pengadaan ruang komputer, memang untuk laptop sendiri didanai oleh pemerintah lewat dana BOS akan tetapi untuk meubelair itu tidak ada anggaran dari pemerintah. Maka dari itu, kita bermusyawarah dengan pihak komite terkait hal itu, kemudian baru disampaikan kepada wali kelas 6 untuk adanya penggalangan dana".⁶⁷



Ruang komputer MIN 1 Purbalingga

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Honiah, S.Ag, M.Pd selaku kepala sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 5 Oktober 2022 pada pukul 11:00 di Ruang tamu MI Negeri 1 Purbalingga.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Makhmud Hidayat Santosa, S.Pd.I selaku guru di MI Negeri 1 Purbalingga.

b. Komite sekolah sebagai Badan Pendukung

Peran komite sekolah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan sangatlah besar. Dalam bukunya Engkoswara yang berjudul *Adminitrasi Pendidikan* menjelaskan, bahwa komite sekolah terdiri dari unsur-unsur: wakil orang tua siswa, wakil guru-guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat, wakil pengusaha/industri, wakil pemerintah daerah, serta wakil pejabat pengendali pendidikan. Jadi, apabila dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak ada dukungan dari orang tua siswa, maka proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pendidikan dapat dikatakan baik apabila ada kontribusi maupun dukungan dari orang tua siswa bukan hanya pihak sekolah saja.

Hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah mengungkapkan:

“Komite di sekolah ini sangat aktif serta kondusif dalam mendukung program-program di sekolah. Mereka siap datang ke sekolah jika diundang oleh sekolah untuk membicarakan program-program dan kegiatan sekolah terutama ketika akan diadakannya ujian untuk kelas 6 komite di ikutsertakan dalam sosialisai guna memberikan motivasi dan ketika ada rapat wali murid kelas 1 juga dilibatkan. Karena, yang kami inginkan kita semua dapat bersinergi dengan baik untuk memajukan sekolah ini.”⁶⁸

Komite sekolah memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang ada di sekolah. Bentuk dukungan yang diberikan baik yang bersifat materi maupun dalam bentuk dukungan lainnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua komite sekolah:

“Sangat banyak peran kami sebagai pendukung, diantaranya yaitu mendukung program-program yang ada di sekolah, mendukung dalam pendanaan terhadap pelaksanaan KBM seperti pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang tidak didanai oleh pemerintah. Ataupun ketika akan diadakannya ujian kelas 6 kita

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Honiah, S.Ag, M.Pd selaku kepala sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang tamu MI Negeri 1 Purbalingga.

pihak komite diikutsertakan untuk sosialisasi dan memberi motivasi kepada para siswa yang akan melakukan ujian”⁶⁹

Hal ini juga dibenarkan oleh Pak Arif Mutaqin:

*“Komite sangat mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Komite biasanya mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh guru. Kalau sekiranya sangat menunjang untuk proses KBM, maka komite sekolah membantu untuk pengadaannya.”*⁷⁰

Salah satu program komite sekolah adalah pengadaan pagar/gerbang besi pada gedung baru. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ketua komite,

*“Program kami pada saat itu adalah pembuatan gerbang besi digedung baru, pembuatan gedung tersebut adalah program pemerintah dan sistemnya borongan akan tetapi ketika gedung itu telah selesai di bangun tidak ada pagar atau gerbang untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal itu karena gedung baru terletak disamping jalan raya, oleh karena itu harus ada pembatas antara sekolah dengan jalan raya apalagi siswa yang MI Negeri 1 Purbalingga masih tergolong anak-anak.”*⁷¹

Komite sekolah menghubungi pihak sekolah untuk komunikasi terkait akan diadakanya pembangunan pagar/ gerbang besi kemudian pihak sekolah menyetujui masukan dari komite sekolah. Terkait dana yaitu diadakanya rapat dengan wali murid kelas 6 guna penarikan iuran untuk pembangunan pagar/gerbang besi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rois Mahfud S.E,

*“Pembangunan pagar/ gerbang besi diadakan dengan mengadakan rapat bersama wali murid kelas 6 untuk penarikan dana pembangunan gerbang besi, karena dana dari pemerintah hanya untuk pembangunan gedungnya jadi kami berinisiatif untuk merealisasikan program tersebut dengan cara penggalangan dana pada wali murid kelas 6.”*⁷²

Hal serupa di ungkapkan oleh Ibu Nur Aeni,

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Mutaqin selaku Guru di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 20 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang Tamu MI Negeri 1 Purbalingga

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud.

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud.

"Waktu itu seluruh wali murid kelas 6 diundang ke sekolah guna membahas terkait pengadaan pagar besi gedung baru, kita mendapat sosialisasi terkait hal itu dari pihak sekolah dan komite, seluruh wali murid menyetujui akan hal itu karena demi keamanan dan keselamatan siswa ketika disekolah. Untuk pendanaannya bersifat sukarela tidak ada paksaan".⁷³

Pembangunan pagar/ gerbang besi terlaksana, hal itu karena adanya komunikasi antara komite sekolah dengan pihak sekolah kemudian disampaikan kepada wali murid.

c. Komite sekolah sebagai badan pengontrol

Peran komite sebagai pengontrol tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena, segala program serta kegiatan yang telah dibuat dan direncanakan harus dikontrol secara berkala dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Peran komite sekolah sebagai pengontrol ialah dalam bentuk mengontrol pelaksanaan program yang ada, mengontrol alokasi dana bagi pelaksanaan program dan melaksanakan penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan.

Adapun peran komite sekolah sebagai pengontrol yang ada di MI Negeri 1 Purbalingga seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Honiah selaku Kepala Sekolah bahwa:

"Setiap perencanaan program yang melibatkan siswa harus atas persetujuan komite sekolah. Dari situlah komite sekolah mempunyai kewajiban untuk mengontrol penyelenggaraan kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu biasanya komite sekolah melakukan pengontrolan terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Tetapi karena komite juga memiliki pekerjaan diluar tugasnya sebagai komite sekolah, pengontrolan yang dilakukan tidak sering."⁷⁴

Selanjutnya Bapak Rois Mahfud mengatakan:

"Pengontrolan yang dilakukan ialah pengontrolan yang sifatnya administratif. Misalnya pendanaan, sarana dan prasarana sekolah yang kurang dan tidak dinanai oleh pemerintah maka kita dari pihak komite akan membuat rencana untuk pengadaan sarana

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Aeni wali murid kelas 6 MI Negeri 1 Purbalingga pada 2 Oktober 2022 pada pukul 14:30 di Rumah Ibu Nur Aeni.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Honiah, S.Ag, M.Pd selaku kepala sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang tamu MI Negeri 1 Purbalingga.

prasarana tersebut. Kalau untuk KBM komite sekolah tidak ikut campur. Komite juga berperan dalam pengontrolan tentang pelayanan kepada masyarakat. Seperti, mengontrol guru agar tidak melakukan pungutan uang apapun.”⁷⁵

Hal lain disampaikan oleh Bapak Makhmud Hidayat Santosa, S.Pd.I

"Komite sekolah melakukan pengontrolan ketika sekolah menyusun KTSP pasti melibatkan komite sekolah. Karena komite sekolah ikut serta dalam mengesahkan dan mendatangi hal tersebut"⁷⁶

d. Komite Sekolah Sebagai Mediator

Adanya kerjasama antara komite sekolah dengan sekolah dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat, dengan begitu masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang lebih dalam membangun pendidikan⁷⁷. Oleh Karena itu, dengan dibentuknya komite sekolah diharapkan dapat menjalin hubungan yang harmonis antar sekolah dengan orang tua siswa serta terciptanya kerja sama yang baik guna membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Arif Mutaqin Selaku guru MIN 1 Purbalingga mengungkapkan bahwa:

“Sejauh ini yang saya tahu, komite sekolah di sekolah ini sudah menjadi penghubung yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa walaupun belum maksimal.”⁷⁸

Selanjutnya Bapak Rois Mahfud S.E, menuturkan bagaimana agar hubungan sekolah dengan orang tua siswa dapat bersinergi dengan baik:

“Sekolah dengan orang tua siswa harus bisa bersinergi dengan baik. Karena menurut saya orang tua sebagai pelanggan dan sekolah sebagai penjual jasa, jadi komite yang sifatnya sebagai pelayanan masyarakat harus memberikan yang terbaik dan harus mampu membuat orang tua siswa merasa puas telah menitipkan anaknya untuk bersekolah di MI Negeri 1 Purbalingga.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Makhmud Hidayat Santosa, S.Pd.I selaku guru di MI Negeri 1 Purbalingga.

⁷⁷ Syamsuddin, peran komite sekolah terhadap penerapan kurikulum, *Jurnal Idaarah*, Vol. 2 No.1 2018, hlm. 90.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Mutaqin selaku Guru di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 20 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang Tamu MI Negeri 1 Purbalingga

Kami juga selalu menginformasikan kepada orang tua siswa yang berkaitan dengan program-program dan kegiatan yang ada disekolah seperti hafalan dani pembacaan asmaul husna sebelum jam pelajaran, menghafal juz 30, dan ada juga program terkait pengadaan kantin sehat disekolah. Dengan orang tua siswa merasa puas maka timbulah rasa yang mampu membuat orang tua siswa tergerak untuk ikut bersinergi dengan sekolah.”⁷⁹

Adapun contoh lain komite sebagai mediator, sebagaimana disampaikan Bapak Rois Mahfud S.E,

"Pernah ada suatu permasalahan yang dialami oleh salah satu siswa kelas 6, dimana siswa tersebut tidak pernah berangkat sekolah karena orang tuanya cerai. Kemudian pihak komite memberitahukan ke pihak sekolah terkait permasalahan tersebut dan pada akhirnya permasalahan tersebut teratasi"

5. Strategi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu

Pada hakikatnya komite sekolah merupakan suatu organisasi yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dibentuknya komite sekolah tidak hanya sebagai pelengkap di sekolah, tetapi komite sekolah mempunyai peran dan mempunyai andil yang cukup besar dalam mensukseskan program sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga memiliki strategi yang dapat dilakukan untuk membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Rois Mahfud selaku ketua komite sekolah:

“Strategi yang pertama dilakukan ialah membentuk struktur organisasi selajutnya kami mengadakan rapat dengan pihak sekolah. Rapat tersebut diadakan berkaitan dengan pembahasan program sekolah. Selanjutnya, strategi yang kami lakukan ialah sebisa mungkin mengcover pendanaan yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Strategi yang kami lakukan ini bertujuan untuk membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini.”⁸⁰

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud

Selanjutnya menurut Ibu Siti Honiah selaku kepala sekolah mengatakan:

“Komite sekolah lebih banyak memberikan saran terhadap pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak didanai oleh pemerintah. Selain itu, karena sekolah juga mempunyai strategi dalam meningkatkan mutu, jadi komite sekolah juga membantu strategi yang dimiliki sekolah agar dapat tercapai sesuai tujuannya. Strategi yang dilakukan sekolah ialah dengan cara pembenahan kurikulum yang inovatif, lebih memberikan kesempatan kepada guru untuk mendapatkan pengetahuan di luar madrasah dan sekolah pun mengadakan program untuk peltihan guru. Untuk siswa pun diadakan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat siswa dan diizinkan untuk mengikuti berbagai lomba supaya dapat menambah pengalaman serta wawasan.”⁸¹

Berikut data terkait prestasi akademik dan non akademik MI Negeri 1 Purbalingga sebagai berikut :⁸²

a. Prestasi Akademik

Rata-rata nilai ujian 3 (tiga) tahun terakhir

No.	Tahun Pelajaran	Rata-rata Nilai Ujian
1.	2018/2019	71,90
2.	2019/2020	79,69
3.	2020/2021	76,68

b. Prestasi Non Akademik

Prestasi Non Akademik dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :⁸³

No.	Nama lomba/kompetisi/kejuaraan/ke	Penyelenggara lomba/kompetisi/kejuaraan/lomb	Prestasi (Juara ke berapa)	Tahun
1	Pesta Siaga Tingkat Kwarran	Kwarran Kertanegara	Juara I Putri	2017
2	Lomba Matematika KSM	KKKMI Kec. Kertanegara	Juara I	2017
3	Lomba MTQ	KKKMI Kec. Kertanegara	Juara II Putra	2017

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Honiah, S.Ag, M.Pd selaku kepala sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang tamu MI Negeri 1 Purbalingga.

⁸² Observasi, di MI Negeri 1 Purbalingga, 21 Agustus 2022

4	Lomba Gerak Jalan	Panitia HUT RI Kec. Kertanegara	Juara I Putra	2017
5	Karnaval SD/MI	Panitia HUT RI Kec. Kertanegara	Juara I	2017
6	Festival dan Lomba Literasi Nasional Bidang	Kemendikbud RI	Harapan III	2017
7	Lomba Matematika KSM	KanKemenag Kab. Purbalingga	Juara III	2017
8	Pesta Siaga	Kwarran Kertanegara	Juara I Putri	2018
9	MTQ Pelajar Cabang Tilawah	KUA Kec. Kertanegara	Juara III Putri	2018
10	Lomba Kreasi CPTS SD/MI	Puskesmas Karangtengah	Juara I	2018
11	Tenis Meja	Panitia HUT RI Kec. Kertanegara	Juara II	2018
12	Karnaval SD/MI	Panitia HUT RI Kec. Kertanegara	Juara I	2018
13	Festival dan Lomba Literasi Nasional	Kemendikbud RI	Harapan I	2018
14	Pesta Siaga Tingkat Kwarran	Kwarran Kertanegara	Juara I Putra dan Putri	2019
15	Pesta Siaga Tingkat Kwarcab	Kwarcab Purbalingga	Juara III Putri	2019
16	LT. II Kwarran	Kwarran Kertanegara	Juara I Putra dan Putri	2019
17	Karnaval SD/MI	Panitia HUT RI Kec. Kertanegara	Juara I	2019
18	Duta LS STBM SD/MI	Puskesmas Karangtengah	Juara III	2019
19	Festival Da'i Cilik	Fak. Ekonomi & Bisnis UMP	Juara I	2019
20	Pesta Siaga	Kwarran Kertanegara	Juara I Putri	2020
21	Pesta Siaga	Kwarran Kertanegara	Juara II Putra	2020
22	Pesta Siaga	Kwarcab Purbalingga	Juara Harapan II Putra	2020
23	Taekwondo Tingkat Nasional	PB Taekwondo Indonesia	Juara 2 Poomsae Pra Cadet A Putra	2021
24	Taekwondo Tingkat Nasional	PB Taekwondo Indonesia	Juara 2 Speed Kicking Pra Cadet B Putra	2021

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat menggambarkan bahwa kinerja serta usaha yang dilakukan oleh komite sekolah sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari usaha komite sekolah untuk sebisa mungkin mengcover pendanaan yang tidak dibiayai oleh pemerintah untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi di sekolah dalam menjalankan program dan kegiatan sekolah. Komite sekolah telah

memberikan pengaruh dalam peningkatan mutu, hal ini dapat dilihat dari prestasi yang diraih dan program-program yang telah berhasil dijalankan oleh pihak sekolah. Tetapi strategi yang dibuat oleh komite sekolah juga belum maksimal, dikarenakan komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga belum melaksanakan seluruh perannya sesuai dengan semestinya.⁸⁴

6. Kendala yang dihadapi komite sekolah dan solusinya

Berdasarkan hasil penelitian, kenyataannya peran yang telah dijalankan oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala yang dihadapi oleh komite sekolah, antara lain: komunikasi yang terhambat antara sekolah dan wali murid, tidak lanjutnya program yang tidak lancar, tidak semua orang tua murid memiliki pemahaman yang sama tentang pendidikan anaknya, dan pengontrolan yang tidak terstruktur. Selain itu, kurangnya intensitas kedatangan komite ke sekolah menjadi kendala utama komite dalam menjalankan perannya. hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua komite sekolah:

*"Kendala yang paling inti adalah volume kunjungan komite ke sekolah. Karena komite sendiri mempunyai kegiatan di luar dari perannya sebagai komite sekolah. Apabila sekolah membutuhkan persetujuan dari komite sekolah terkait penyelenggaraan kegiatan, maka harus membuat janji dari jauh-jauh hari. Jadi kendala yang paling terasa adalah terkait waktu, situasi, dan kondisi."*⁸⁵

Adapun kendala lain terkait dari kepengurusan komite sekolah itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rois Mahfud S.E,

"Kendala lain datang dari kepengurusan komite itu sendiri, orang yang telah dipilih untuk masuk kepengurusan komite biasanya akan kurang kontribusinya ketika anaknya telah lulus dari MI Negeri 1 Purbalingga, adapun karena struktur kepengurusan komite bukan seluruhnya orang yang bertempat tinggal di daerah dekat sekolah. Maka dari itu menghambat ketika ada rapat komite dengan pihak sekolah".

⁸⁴ Observasi, di MI Negeri 1 Purbalingga, 21 Agustus 2022

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud

Dari kendala yang dihadapi oleh komite sekolah seperti yang sudah dipaparkan di atas, maka solusi yang diberikan oleh ketua komite sendiri terkait pemilihan kepengurusan komite sekolah kedepannya harus memilih wali murid yang anaknya masih lama bersekolah di MI Negeri 1 Purbalingga, agar lebih lama berkontribusinya. Karena ada beberapa wali murid yang ketika anaknya sudah lulus maka akan sangat sedikit kontribusinya didalam komite sekolah.

C. Analisis Data

Sebagai badan mandiri yang juga ikut berpartisipasi di sekolah dan bersifat independen, keberadaan komite sekolah difokuskan untuk membantu dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan, maka secara kelembagaan pengurus komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga diharapkan agar dapat menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsinya, hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan No 044/U/2002 yaitu tentang komite sekolah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan No. 75 Tahun 2016.

Dari keputusan Menteri Pendidikan No. 75 Tahun 2016, komite sekolah yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di lembaga sekolah, dari pihak sekolah harus memberi ruang agar komite sekolah dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan sebaik mungkin. Adapun peran komite sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komite Sekolah Sebagai Badan Pemberi Pertimbangan

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan berperan untuk memberikan masukan terhadap pengelolaan pendidikan seperti pelaksanaan program dan kurikulum. Memberikan pertimbangan terhadap penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana. Memberikan pertimbangan terhadap penyusunan Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Serta memberikan pertimbangan terhadap kriteria tenaga pendidik. Namun pada realitanya tidak semua peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dilakukan oleh komite

sekolah, salah satunya seperti komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga. Komite sekolah lebih terlihat berperan dalam pemberi pertimbangan atau masukan pada program sekolah, serta sarana dan prasarana. Seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah MI Negeri 1 Purbalingga terkait RAPBS/RKAKL, karena sekolah ini Negeri maka komite tidak ikut serta dalam penyusunan maupun pengesahan. Karena penyusunan RAPBS tersebut dilakukan atau disusun langsung oleh kepala sekolah dengan pusat akan tetapi komite diberi tahu akan hal itu. Tapi ketika pembuatan KTSP komite pasti dilibatkan bersama pihak sekolah seperti guru, karyawan.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai peran komite sebagai badan pertimbangan dapat disimpulkan bahwa dalam komite MI Negeri 1 Purbalingga tidak ikut serta dalam penyusunan RAPBS karena sekolah tersebut sudah Negeri seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah MI Negeri 1 Purbalingga. Akan tetapi selain hal itu komite sekolah sangat berperan dalam pengadaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang tidak di danai oleh pemerintah dan mendukung program-program yang ada di MI Negeri 1 Purbalingga seperti afalan Asmaul Husna dan Juz 30.

2. Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung

Dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berupa pemikiran, ide, gagasan maupun tenaga. Jika dahulu peran komite lebih sebagai pendukung pendanaan, maka sekarang peran komite lebih ditekankan pada aspek lain, terutama dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.⁸⁶

Bentuk dukungan komite sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan lebih menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan adalah sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁶ Sri Renani Pandjastuti, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), hlm. 82.

⁸⁷ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 258.

- a. Pemanfaatan sarana prasarana di lingkungan sekolah untuk pembelajaran;
- b. Membuat program penerapan kedisiplinan guru, siswa dan karyawan di sekolah;
- c. Memaksimalkan anggaran operasional sekolah dan mendorong penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, komite sekolah ikut dalam memberikan dukungan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana serta anggaran di sekolah, yakni:

- a. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah;
- b. Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah;
- d. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah;
- e. Mengkoordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.

Mengenai peran komite sekolah sebagai badan pendukung terhadap sekolah tersebut dapat penulis kelompokkan menjadi tiga peran, yaitu dukungan dalam pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, peran komite sangat terlihat jelas seperti membantu pihak sekolah dalam menggali dana yang digunakan untuk pengadaan ruang komputer, pengadaan pagar besi ataupun. Sedangkan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, berdasarkan hasil wawancara dengan komite sekolah mereka dilibatkan dalam penentuan anggaran yang tidak dianggarkan oleh pemerintah dan setelah ditentukan rencana penggunaan anggaran tersebut, maka komite nebdukung dalam pelaksanaanya. Hal ini dapat dilakukan dalam pengadaan pengadaan ruang komputer, pengadaan pagar besi.

Berkaitan dengan perannya dalam pengelolaan sumber daya manusia sebenarnya hal ini merupakan tugas pokok kepala sekolah. Namun dalam suatu lembaga, tidak ada satupun bagian yang tidak penting untuk dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Semua bagian dalam suatu lembaga mampu memelihara hubungan kerja yang baik dan mendukung satu sama lain. Mengenai dukungan dalam pengelolaan tenaga pendidik komite sekolah kurang begitu berperan, sebagian dari mereka mempunyai anggapan bahwa mengenai urusan peserta didik, tenaga pendidik dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu sepenuhnya wewenang sekolah dalam hal ini adalah wewenang kepala sekolah.

Dari pernyataan komite sekolah, penulis menyimpulkan bahwa peran komite sekolah dalam bentuk dukungan tidak jauh berbeda, artinya masih sebatas persoalan dana seperti mewujudkan sarana prasarana dan pembangunan. Begitupun dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia, berkenaan dengan kualitas tenaga pendidik maupun peserta didik komite sekolah juga ikut mendukung dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah.

3. Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol

Peran komite sekolah sebagai pengontrol atau pengawas yang dapat dilakukan oleh komite sekolah sebagaimana dirinci oleh Syaiful Sagala berupa aktivitas sebagai berikut:⁸⁸

- a. Menanyakan proses belajar mengajar pada guru maupun siswa apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi yang diinginkan;
- b. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Sekolah;
- c. Turut serta dalam penyusunan RKT dan RKS;
- d. Mamantau penggunaan anggaran yang bersumber dari dana BOS;
- e. Mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;

⁸⁸ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 232.

- f. Melakukan pemantauan terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa;
- g. Pengawasan dalam pelaksanaan ujian nasional;
- h. Melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran yang berhubungan dengan pelaksanaan KBM;

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, terkait komite sekolah sebagai badan pengontrol di MI Negeri 1 Purbalingga komite sekolah melakukan pengontrolan yang sifatnya administratif. Misalnya pendanaan, sarana dan prasarana sekolah yang kurang dan tidak didanai oleh pemerintah maka dari pihak komite akan membuat rencana untuk pengadaan sarana prasarana tersebut. Sedangkan untuk KBM komite sekolah tidak ikut campur tetapi ketika akan diadakanya ujian kelas 6, komite sekolah dilibatkan dalam sosialisasi dan memberi motivasi kepada siswa yang akan melakukan ujian. Komite juga berperan dalam pengontrolan tentang pelayanan kepada masyarakat. Seperti, mengontrol guru agar tidak melakukan pungutan uang apapun.

4. Komite Sekolah Sebagai Mediator

Kaitannya dengan peran komite sebagai mediator atau penghubung, sekolah itu sendiri merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lingkungannya, sebaliknya masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari lembaga sekolah. Keduanya memiliki kepentingan yang saling terkait, sekolah merupakan lembaga formal yang disertai tugas untuk mendidik, melatih dan membimbing generasi penerus masa depan, sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan tersebut. Masyarakat mengharapkan agar lembaga sekolah mampu menempa peserta didik menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas untuk mengembangkan potensi masyarakat setelah mereka lulus.⁸⁹

⁸⁹ Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 148.

Sagala menjabarkan tugas dan peran komite sekolah sebagai mediator atau penghubung yakni:

- a. Menghubungkan sekolah dengan instansi pemerintah;
- b. Menghubungi orang tua siswa untuk meminta kesediannya menjadi penyumbang dana yang diperlukan untuk kegiatan memajukan pendidikan di sekolah;
- c. Mencari informasi yang terkait dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
- d. Memberi laporan kepada masyarakat tentang penggunaan keuangan dan pelaksanaan program di satuan lembaga pendidikan tersebut.⁹⁰

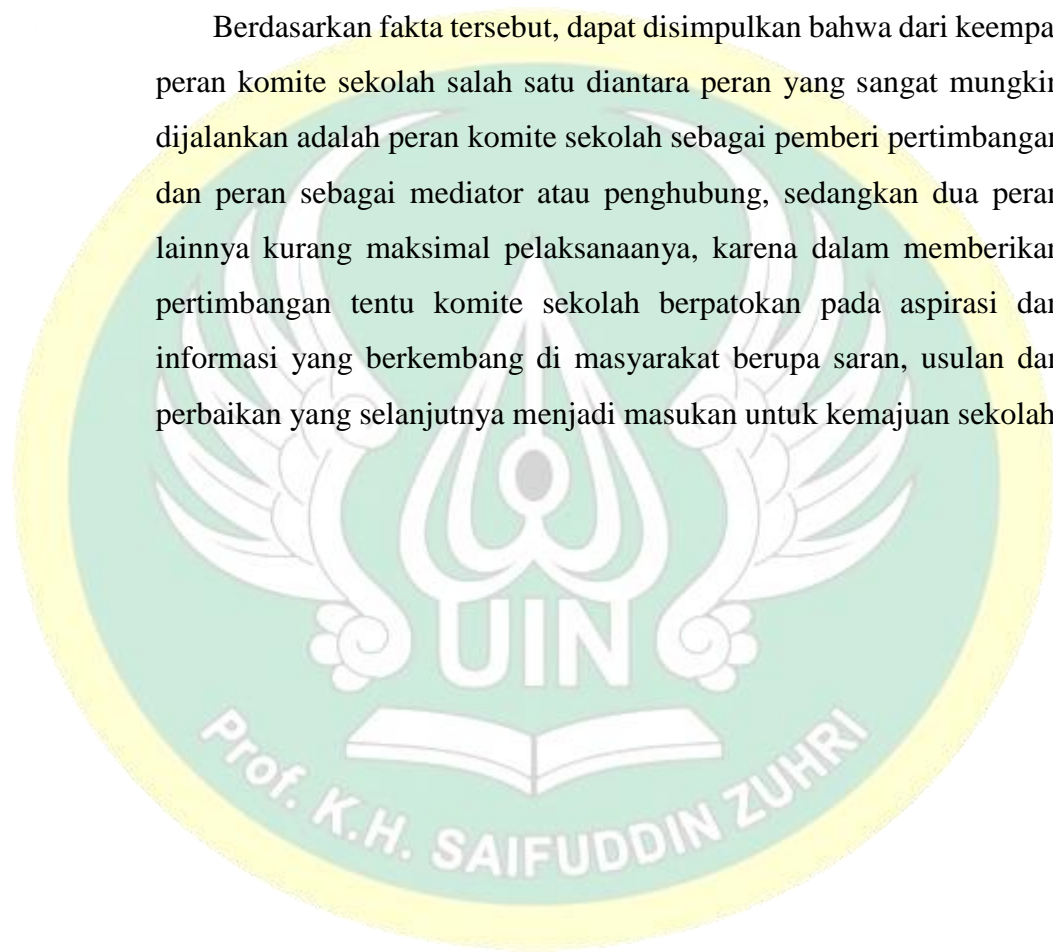
Dalam perannya sebagai mediator atau penghubung, komite sekolah menghubungkan pihak sekolah dengan pemerintah dan dari pengamatan di lapangan peran ini tidak terlaksana, karena komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga tidak mempunyai wewenang terkait anggaran dari pemerintah. Komite sekolah hanya sekedar mengetahui tentang anggaran tersebut, terkecuali anggaran diluar dana BOS komite sangat berperan dalam hal pendanaan tersebut. Sedangkan perannya dalam menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat dapat lebih banyak dilakukan, salah satu diantaranya yaitu membantu menyerap aspirasi, harapan dan saran masyarakat untuk kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Masukan dari masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah sebagai pengelola pendidikan supaya mutu lulusan sekolah memang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.

Dari data yang telah peneliti paparkan tersebut, dapat terlihat bahwa peran komite sekolah sebagai mediator atau penghubung selain dengan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, karena seseorang yang dipilih sebagai pengurus komite adalah mereka yang sudah

⁹⁰ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 230.

dianggap tokoh masyarakat sehingga banyak kesempatan bertemu dengan masyarakat di luar sekolah walaupun bukan dalam pertemuan formal di sekolah. Karena kesempatan kepala sekolah bertemu langsung dengan seluruh orang tua siswa hanya satu atau dua kali dalam setahun, maka keberadaan komite sekolah yang diwakili oleh orang-orang yang dekat dengan masyarakat menjadi sarana penghubung yang tepat antara pihak sekolah dengan orang tua atau masyarakat.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari keempat peran komite sekolah salah satu diantara peran yang sangat mungkin dijalankan adalah peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dan peran sebagai mediator atau penghubung, sedangkan dua peran lainnya kurang maksimal pelaksanaannya, karena dalam memberikan pertimbangan tentu komite sekolah berpatokan pada aspirasi dan informasi yang berkembang di masyarakat berupa saran, usulan dan perbaikan yang selanjutnya menjadi masukan untuk kemajuan sekolah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MI Negeri 1 Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga dari perannya sebagai badan pemberi pertimbangan, komite sekolah memberikan pertimbangan dan masukan terhadap program-program sekolah, memberikan pertimbangan serta saran dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana. Perannya sebagai badan pendukung, komite mendukung pendanaan terhadap pelaksanaan KBM serta mendukung dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang tidak didanai oleh pemerintah. Perannya sebagai pengontrol, komite melakukan pengontrolan terhadap pendanaan yang tidak didanai oleh pemerintah, sarana dan prasarana sekolah, dan mengontrol guru agar tidak melakukan pungutan uang apapun. Perannya sebagai mediator/ badan penghubung, komite sekolah telah menjadi penghubung yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa seperti ketika ada program terkait pengadaan sarana dan prasarana sekolah maka komite sekolah dengan pihak sekolah mengadakan rapat untuk membahas terkait program tersebut.

Namun, dalam menjalankan perannya sebagai badan pengontrol dapat disimpulkan belum optimal dikarenakan beberapa hal, seperti komite sekolah tidak selalu berada di sekolah. Hal itu dikarenakan komite memiliki pekerjaan diluar tugas mereka sebagai komite sekolah sedangkan dalam hal peran komite sebagai pendukung sudah cukup baik karena komite mendukung segala program-program yang ada di MI Negeri 1 Purbalingga dengan adanya kesepakatan antara komite sekolah dengan pihak sekolah. Selain itu, komite sekolah juga memberikan dukungan seperti mengadakan penggalangan dana kepada orang tua siswa yang berlandaskan keikhlasan orang tua siswa atau sukarela tanpa adanya paksaan.

B. Keterbatasan Penelitian

Setiap kegiatan pasti ada kendala atau keterbatasan. Begitu pula dengan penelitian ini memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian dari peneliti sebagai berikut :

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti.
2. Keterbatasan waktu dan tenaga.
3. Keterbatasan buku referensi.
4. Keterbatasan pengumpulan data karena faktor tertentu.

Keterbatasan – keterbatasan yang disebutkan di atas berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Namun peneliti telah berupaya untuk memaksimalkan susunan skripsi ini.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti, ada beberapa hal yang dapat disampaikan peneliti sebagai saran terhadap komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga, yaitu:

1. Komite sekolah harus lebih memahami tugas dan perannya sesuai dengan keputusan pemerintah.
2. Kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan komite sekolah dapat bekerjasama serta bersinergi lebih baik lagi untuk memajukan sekolah.
3. Komite sekolah sebagai badan pertimbangan diharapkan dapat dilibatkan untuk memberikan pertimbangannya dalam pembuatan rencana anggaran sekolah dan dalam menentukan kriteria perekrutan tenaga pendidik.
4. Komite sekolah diharapkan dapat bekerja lebih aktif lagi dan sering melakukan pengontrolan ke sekolah secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Arcaro, J. S. *Pendidikan Berbasis Mutu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Budimansyah, D. Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat. *Educationist*, Vol. II, 2008.
- Emzir, S. M. *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Fatah, N. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Idris, R. Pendekatan Pendidikan Berbasis Mutu. *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 12 No. 1, 2009..
- Komariah, E. d. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Kompri. *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1998, hlm.26.
- Makbuloh, D. *Manajemen Mutu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UII PRESS, 1992, hlm. 20.
- Miniarti, S. *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011.
- Mulyasa, H. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Mulyono. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005, Tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan.

Prabowo, B.S. *Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di SMP Negeri 3 Godean. Skripsi*. Program Manajemen Pendidikan Islam. 2012

Prihantoro Rudy, *Konsep Pengendalian Mutu*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012

Qomar, M. *Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Sabri, H. A. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Sagala, Syaiful, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Sani, R. A. *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Sanjaya, W. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.

Sayuti, Z. d. *Ilmu Pendidikan: Pengantar dan Dasar-dasar Pelaksanaan Pendidikan*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.

Sri Wardiah, d. Strategi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 Lokhnga. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 3, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.

Suharsaputra, U. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Prosedur Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.234.

Sujanto, B. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: CV Sagung Seto, 2007.

Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Teras, 2009.

Syamsuddin. Peran Komite Sekolah Terhadap Penerapan Kurikulum. *Jurnal*

Idarah, Vol. 2 No.1, 2018.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UPI, T. D. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.

Wahyusumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Widodo, H. Potret Pendidikan di Indonesia Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi

Masyarakat. *Jurnal Cendekia*, Vol. 13 No. 2, 2015.

Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.170.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Wawancara dan Observasi di MI Negeri 1 Purbalingga

Wawancara dengan Kepala Sekolah MI Negeri 1 Purbalingga



Wawancara dengan Ketua Komite MI Negeri 1 Purbalingga



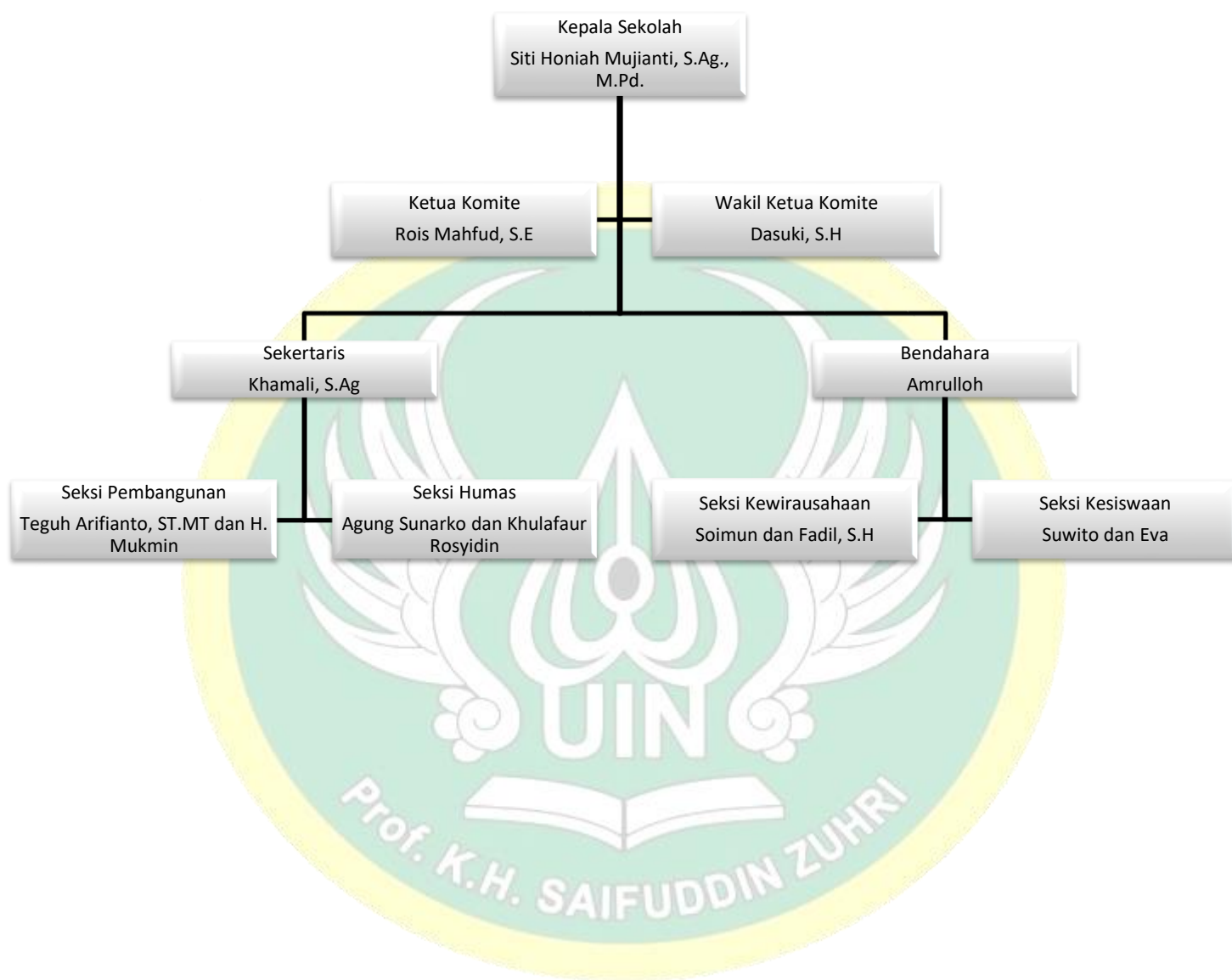
Wawancara dengan Guru MI Negeri 1 Purbalingga



Ruang komputer MI N 1 Purbalingga



Struktur Kepengurusan Komite Sekolah MI Negeri 1 Purbalingga



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Ketua komite

1. Bagaimana proses terbentuknya komite sekolah di MIN 1 Purbalingga?
2. Terdiri dari siapa sajakah yang masuk dalam kepengurusan komite sekolah?
3. Bagaimana pembagian tugas komite sekolah di MIN 1 Purbalingga?
4. Apakah komite sekolah di MIN 1 Purbalingga sudah berjalan sesuai dengan tujuannya?
5. Menurut Bapak, apakah komite sekolah di MIN 1 Purbalingga sudah menjalankan perannya dengan baik?
6. Apakah komite sekolah memiliki program tersendiri?
7. Apa saja peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan?
8. Apakah komite sekolah berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada sekolah terhadap program sekolah?
9. Apakah komite sekolah dilibatkan dalam penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah?
10. Apakah komite sekolah dilibatkan dalam memberikan pertimbangan untuk kriteria tenaga pendidik di sekolah ini?
11. Apakah komite sekolah berpartisipasi/ menyampaikan usulan dalam membuat kebijakan sekolah? Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan komite?
12. Apa saja peran komite sekolah dalam mendukung program dan kegiatan sekolah?
13. Seperti apa peran komite sekolah, apabila sekolah kekurangan dana dalam penyelenggaraan pendidikan?
14. Apa saja peran komite sekolah sebagai pengawas?
15. Pengawasan seperti apakah yang komite sekolah lakukan pada penyelenggaraan pendidikan di MIN 1 Purbalingga?
16. Bagaimana cara bapak mengawasi terkait alokasi anggaran untuk

pelaksanaan program sekolah?

17. Apa saja peran komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan orang tua siswa di sekolah?
18. Apa peran komite sekolah sebagai mediator antara pihak sekolah dengan orang tua siswa?
19. Sebagai ketua komite sekolah, bagaimana cara Bapak agar hubungan sekolah dengan orang tua siswa dapat bersinergi dengan baik?
20. Menurut Bapak, apakah dengan adanya komite sekolah mampu mempengaruhi mutu Pendidikan?

Wawancara kepala sekolah

1. Apa yang Ibu ketahui tentang program dan perkembangan komite sekolah di sekolah ini?
2. Menurut Ibu, apakah dengan adanya komite sekolah dapat meningkatkan tanggungjawab dan peran serta orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan di MIN 1 Purbalingga?
3. Apakah komite sekolah dilibatkan dalam membuat usulan kebijakan di sekolah? Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan komite?
4. Menurut Ibu, sejauh mana peran komite sekolah dalam pemberi pertimbangan di sekolah ini?
5. Menurut Ibu, sejauh mana peran komite sekolah dalam mendukung program dan kegiatan sekolah?
6. Apa saja bentuk bantuan atau dukungan yang diberikan komite sekolah terkait sarana dan prasarana di sekolah?
7. Apakah komite sekolah sering melakukan pengawasan di sekolah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik?
8. Menurut Ibu, sejauh mana peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MIN 1 Purbalingga?
9. Menurut Ibu, apakah komite sekolah sudah menjalankan perannya dengan baik?
10. Apakah MIN 1 Purbalingga sudah memenuhi standar mutu pendidikan?

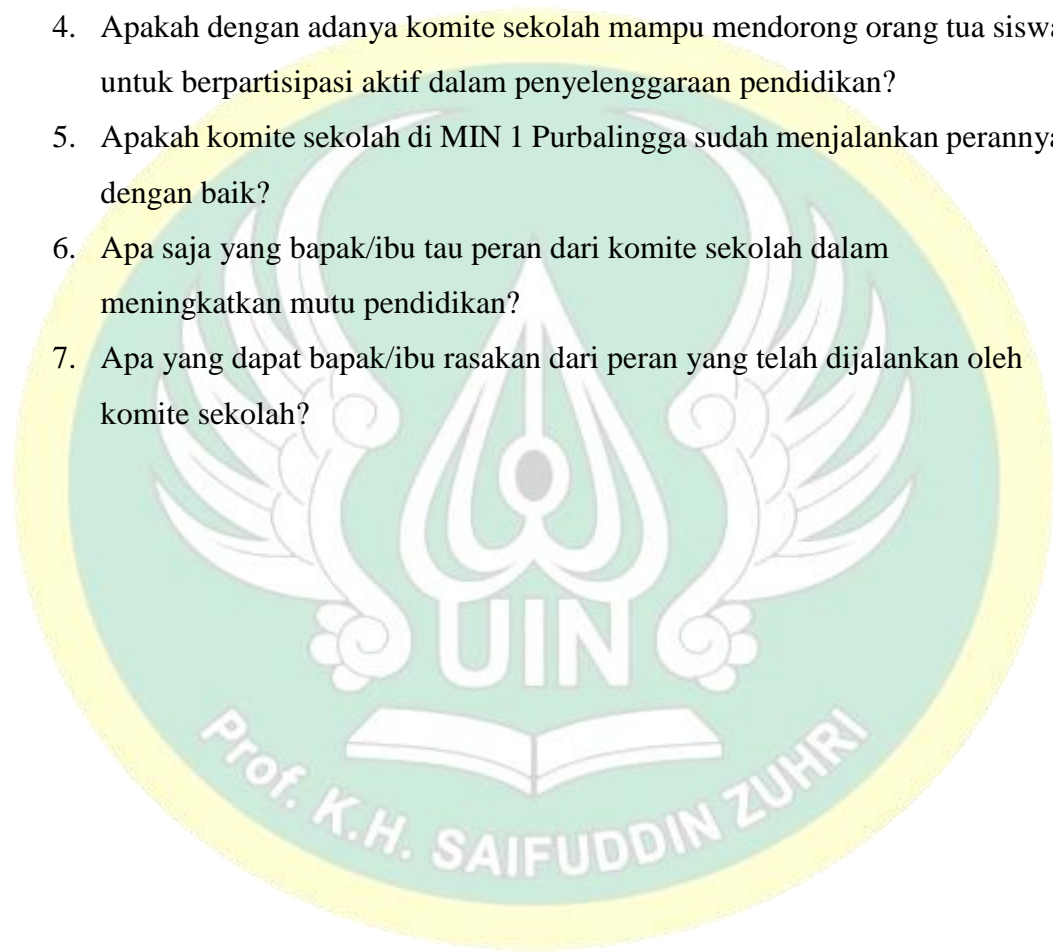
11. Apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini sudah memenuhi standar?
12. Apakah di sekolah terdapat pelatihan/ diklat untuk guru?
13. Apakah semua guru di sekolah ini sudah memiliki sertifikat pendidik?
14. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan di MIN 1 Purbalingga?
15. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MIN 1 Purbalingga?
16. Bagaimana cara sekolah dalam mempertahankan mutu pendidikan?
17. Menurut Ibu, apakah dengan adanya komite sekolah mampu mempengaruhi mutu pendidikan di MIN 1 Purbalingga?

Wawancara guru

1. Sejak kapan ibu/bapak mengajar di sekolah ini?
2. Apakah di sekolah ini terdapat pelatihan/ diklat untuk guru?
3. Apakah semua guru mengikuti pelatihan atau hanya guru tertentu saja?
4. Apakah ibu/ bapak sudah memiliki sertifikat pendidik?
5. Apakah komite sekolah terlibat dalam membuat usulan/ kebijakan di sekolah? Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh komite sekolah?
6. Apakah komite sekolah ikut serta dalam mendukung proses pembelajaran guru di kelas? Bagaimana bentuk realisasinya?
7. Bagaimana cara komite sekolah dalam mengawasi kondisi tenaga pendidik di sekolah? Sepengetahuan bapak/ibu seberapa sering pengawasan dilakukan?
8. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini?
9. Menurut bapak/ ibu, apakah komite sekolah sudah menjadi penghubung yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa?

Wawancara Wali Murid:

1. Apa yang bapak/ibu ketahui terkait komite sekolah?
2. Apakah dengan adanya komite sekolah dapat meningkatkan tanggungjawab dan peran serta orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga?
3. Apakah komite sekolah di sekolah ini dalam mewadahi menyalurkan aspirasi serta ide dari orang tua siswa sudah efektif?
4. Apakah dengan adanya komite sekolah mampu mendorong orang tua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan?
5. Apakah komite sekolah di MIN 1 Purbalingga sudah menjalankan perannya dengan baik?
6. Apa saja yang bapak/ibu tau peran dari komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan?
7. Apa yang dapat bapak/ibu rasakan dari peran yang telah dijalankan oleh komite sekolah?



Lampiran 3




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp. (0281) 635624, 628250 Fax: (0281) 636553, www.iainpurwokerto.ac.id

				Pengadegan Kabupaten Purbalingga
14.	Dr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I	Kholifah Nurul Islamiyah	1817401064	Analisis SWOT Program Tahfidz Al-Quran di TK IT Harapan Bunda Purwokerto
15.	Dr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I	Sinta Roisah	1817401081	Manajemen Pembiayaan Pendidikan di KB Queensa Cilogok Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas
16.	Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd	Mutamimatul Hikmah	1817401072	Gaya Kepemimpinan Karismatik Kiai di pondok Pesantren Manba'ul Ulum Jetak Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
17.	Dr. Saefudin, M.Ed	Iskholatin Fadilah	1817401063	Implementasi Program Pendidikan Life Skill di MA Al- Falah Jatilawang Banyumas
18.	Dr. Khalid Mawardi, M.Hum	Aldi Prastiya	1817401006	Peran Tokoh Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga
19.	Riris Eka Setiani, M.Pd.I	Astria Wigati	1817401050	Manajemen Kurikulum di Ra Diponegoro Majapura Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga
20.	Dr. Nurkholis, M.S.I	Kurniasih	1817401065	Kebijakan Kepala Sekolah dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa di SMP Negeri 2 Bojongsari Kabupaten Purbalingga
21.	Ahmad Sahnan, S.Ud., M.Pd.I	Rossy Roudlotul Hujjah	1817401080	Manajemen Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru di Mi Ma'arif 01 Adimulya Wanareja Cilacap
22.	Mujiburrohman, M.S.I	Nur Ashari	1817401076	Manajemen Program Tuesday Fun Day (TFD) Di TPQ Darul Abror Purwokerto Utara
23.	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag	Novita Indah Nurlaela	1817401074	Manajemen Pengembangan Bakat Minat pada Program Vokasi Life Skill di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas
24.	Dr. Sri Winarsih, M.Pd	Ulfah Isti'adah	1817401087	Manajemen Keuangan di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu
25.	Toifur S.Ag, M.Si	Siti Rofikoh	1817401082	Manajemen Kelas Pada Pendidikan Inklusi Di Mts Al-hidayah Purwokerto Banyumas
26.	Sutrimo Purnomo, M.Pd.I	Ika Apriliani	1817401017	Implementasi Kebijakan Sekolah Tentang Perilaku Disiplin di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang Banyumas
27.	Zuri Pamuji, M.Pd.I	Sheila Nisa Azzahra	1817401040	Manajemen Pembelajaran Daring pada Program Pendidikan Kesetaraan di PKBM Ar-Rosyid Purwokerto
28.	Donny Khoerul Aziz	Wakhid Daturrohmah	1817401044	Manajemen Bimbingan Prestasi Belajar di SD negeri 4 Kebutuhduwur



IAIN.PWT/FTIK/05.02
Tanggal Terbit : 12 Oktober 2021
No. Revisi : 00

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 PURBALINGGA
 Jalan Raya Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga 53358
 Telepon 08112919809 – (0281) 7700977 – (0281) 7700856
 email : minkrangean@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 122/Mi.11.03.01/HM.00/05/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Siti Honiah Mujiati, S.Ag., M.Pd.
NIP	: 197605152005012002
Pangkat/Gol.	: Pembina/IV a
Jabatan	: Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Purbalingga


dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama	: Aldi Prastya
NIM	: 1817401006
Semester	: VII (Tujuh)
Perguruan Tinggi	: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam
Tahun Akademik	: 2021

yang bersangkutan tersebut di atas untuk melakukan observasi pendahuluan di MIN 1 Purbalingga untuk penyusunan skripsi yang berjudul, “Peran Tokoh Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga”, pada tanggal 22 s.d.30 November 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krangean, 12 Mei 2022
 Kepala,



Siti Honiah Mujiati, S.Ag., M.Pd.
 NIP. 197605152005012002

Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

BLANGKO BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Aldo Prastiya
No. Induk : 1817401006
Fakultas/Jurusan : FTIK/Manajemen Pendidikan Islam(MPI)
Pembimbing : Dr. Kholid Mawardi, S.Ag,M.Hum
Nama Judul : Peran Tokoh Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
	Jum'at, 21 Januari 2022	- Latar belakang masalah - Metode penelitian - Kajian pustaka		
	Sabtu, 12 Maret 2022	- Penulisan cover - Kajian pustaka - studi pendahuluan		
	Kamis, 12 Mei 2022	- Daftar Pustaka - Footnote		



IAIN.PWT/FTIK/05.02
Tanggal Terbit : disisi tanggal
No. Revisi : 0



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

--	--	--	--


Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 12 Mei 2022
Dosen Pembimbing

Dr. Kholid Mawardi, S.Ag,M.Hum
NIP.19740228 199903 1 005



IAIN.PWT/FTIK/05.02
Tanggal Terbit : disisi tanggal
No. Revisi : 0

Lampiran 6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
 www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 No.B.e-3377 /Un.19/FTIK.J.MPI/PP.05.3/ 07 /2022

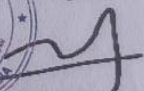
Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi MPI, pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Purwokerto menerangkan bahwa proposal skripsi berjudul :


Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga

Sebagaimana disusul oleh,

Nama	: ALDI PRASTIYA
NIM	: 1817401006
Semester	: VIII
Program Studi	: MPI

Benar-benar telah diseminarkan pada tanggal : 20/06/2022
 Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 20/06/2022
 Koordinator Program Studi

 Ardy Wiyani, M.Pd.I.



Lampiran 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN**No. B-3942/Un.19/WD1.FTIK/PP.05.3/9/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik, menerangkan bahwa :

N a m a : Aldi Prastiya
 NIM : 1817401006
 Prodi : MPI

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 September 2022
 Nilai : A

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 19 September 2022

Wakil Dekan Bidang Akademik,

[Signature]
 D. Suparjo, M.A.

NIP. 19730717 199903 1 001

Lampiran 8



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.ftik.uinsaizu.ac.id

Nomor : B.m.1652/Un.19/D.FTIK/PP.05.3/07/2022 05 Juli 2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Ijin Riset Individu**

Kepada
Yth. Kepala sekolah MIN 1 Purbalingga
Kec. Kertanegara
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, memohon dengan hormat saudara berkenan memberikan ijin riset kepada mahasiswa kami dengan identitas sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama | : Aldi Prastiya |
| 2. NIM | : 1817401006 |
| 3. Semester | : 9 (Sembilan) |
| 4. Jurusan / Prodi | : Manajemen Pendidikan Islam |
| 5. Alamat | : Kragean RT 02 RW 03 kec. Kertanegara kab. Purbalingga |
| 6. | : Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di MI Negeri 1 Purbalingga |

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Obyek | : Peran Komite sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan |
| 2. Tempat / Lokasi | : MI N 1 Purbalingga |
| 3. Tanggal Riset | : 20-07-2022 s/d 20-09-2022 |
| 4. Metode Penelitian | : Kualitatif |

Demikian atas perhatian dan ijin saudara, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Ketua Jurusan Pendidikan Islam



M. Slamet Yahya

Tembusan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Purbalingga

Lampiran 9



Lampiran 10

**SERTIFIKAT**

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13204/07/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ALDI PRASTIYA
NIM : 1817401006

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	77
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 07 Jan 2020

ValidationCode

Lampiran 12

UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.siba.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE
 الشهادة
 No. B-1571/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/VIII/2022

This is to certify that
 Name: **ALDI PRASTIYA**
 Place and Date of Birth: **Purbalingga, 11 Oktober 2000**
 Has taken: **IQLA**
 with Computer Based Test, organized by
 Technical Implementation Unit of Language on:
31 Agustus 2022
 with obtained result as follows

Listening Comprehension: **46** Structure and Written Expression: **47** Reading Comprehension: **49**
 فهم السموع فهم العبارات والتراكيب فهم المقروء

Obtained Score : **472** المجموع الكلي :

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سبق الدين زهري الإسلامية الحكومية بـوروكرتو.

31 Agustus 2022
 The head,
 رئيسة
 Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004



Lampiran 13

LPPM

SERTIFIKAT
 Nomor: 551/K.LPPM/KKN.48/08/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **ALDI PRASTIYA**
 NIM : **1817401006**
 Fakultas/Prodi : **FTIK / MPI**

TELAH MENGIKUTI
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-48 Tahun 2021
 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **91 (A)**.

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
 Ketua LPPM,
 NIP. 19650407 199203 1 004




Lampiran 14



Lampiran 15



Lampiran 16



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 PURBALINGGA
TERAKREDITASI A
 Jalan Raya Krangean RT 01/01, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga
 E-mail : minkrangean@gmail.com Telepon (0281) 7700977 – 7700856 Kode Pos 53358

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 272/Mi.11.03.01/HM.00/09/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Siti Honiah Mujiati, S.Ag., M.Pd.
NIP	: 197605152005012002
Pangkat/Gol.	: Pembina/IV a
Jabatan	: Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Purbalingga

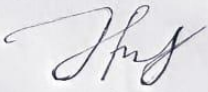
dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama	: Aldi Prastiya
NIM	: 1817401006
Semester	: 9 (Sembilan)
Perguruan Tinggi	: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam
Tahun Akademik	: 2021/2022

yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan riset individu di MIN 1 Purbalingga dalam penyusunan skripsi yang berjudul, “Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di MI Negeri 1 Purbalingga”, pada bulan Juli s.d September 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krangean, 21 September 2022
 Kepala,



Siti Honiah Mujiati, S.Ag., M.Pd.
 NIP. 197605152005012002

Lampiran 17

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MI NEGERI 1 PURBALINGGA

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

10%

★ e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Lampiran 18

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Aldi Prastiya
Nim : 1817401006
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 11 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki- laki
Alamat : Krangean RT 02/03, Kec. Kertanegara,
Kab. Purbalingga.
Nomor HP : 087883180304
Email : aldiprastiya3@gmail.com
Nama Ayah : Mutorir
Nama Ibu : Khomsiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Diponegoro krangean
2. MI Negeri 1 Purbalingga
3. MTs Negeri 1 Purbalingga
4. SMK Ma'arif Nu Bobotsari
5. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 20 September 2022



Aldi Prastiya

NIM.1817401006